

PEMBERONTAKAN KOMUNIS SILUNGKANG 1926–1927 SEBUAH GERAKAN ISLAM REVOLUSIONER¹

Amri Marzali

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, amrimarzali@gmail.com

DOI: 10.17510/paradigma.v10i1.394

ABSTRACT

This article discusses what was called by the Dutch Colonial Government as ‘*The Communist Uprisings of 1926-1927*’. Instead of ‘the communist uprisings’, the writer tends to call this people’s resistance as ‘the Revolutionary Islamic Movement’. The writer finds the facts in which the dominant organization involved in the uprising was Sarekat Islam, a spilt faction of Sarekat Islam. The correction is based on different documents and reports, namely the resources issued by the colonial government, books written by political researchers of the West and by a local historian such as Mestika Zed, books and articles written by the local Silungkang’s experts, a book written by an actor of the movement, and the ethnographic reports written by the writer. These documents, reports, and books enable the writer to fully catch on the political, economic, social, and cultural background of ‘the Revolutionary Islamic Movement’.

KEYWORDS

Sarekat Rakyat, Partai Komunis Indonesia, Tan Malaka, Mestika Zed, “Hermes dilemma”.

ABSTRAK

Makalah ini membahas apa yang disebut oleh Pemerintah Kolonial Belanda peristiwa “Pemberontakan Komunis Silungkang”, yang terjadi pada akhir Desember 1926 dan awal 1927. Dalam makalah ini, penulis mengkritik penyebutan *pemberontakan komunis* untuk peristiwa ini. Sebaliknya, penulis ingin memperlihatkan bahwa unsur yang dominan dalam gerakan ini adalah organisasi Islam revolusioner, Sarekat Rakyat, yaitu organisasi pecahan dari Sarekat Islam, yang berjuang dengan prinsip *fisabilillah*. Karena itu, penulis dengan didukung oleh fakta di tempat kejadian, cenderung untuk menyebut peristiwa ini dengan Gerakan Islam Revolusioner. Dalam rangka mendukung kritik, penulis akan menggunakan berbagai sumber tertulis yang dikeluarkan oleh instansi resmi kolonial Belanda, tulisan pakar Barat, dan tulisan sejarawan lokal, Mestika Zed. Di samping itu, penulis juga menggunakan tulisan cendekiawan lokal Nagari Silungkang, tulisan salah seorang pelaku gerakan perlawanan, dan hasil penelitian etnografi yang pernah

¹ Makalah ini adalah terjemahan sekaligus penyempurnaan dari makalah yang disajikan sebagai *key note speech* dalam *Conference of the International Indonesian Forum for Asian Studies* (IIFAS), 29-30 September 2015 di Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat.

dilakukan oleh penulis di Nagari Silungkang bersama seorang peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dengan cara demikian, penulis dapat memberikan gambaran situasi dan kondisi politis, ekonomis, sosial, dan budaya lokal Silungkang secara lebih lengkap sebagai latar belakang yang mendorong gerakan pemberontakan ini.

KATA KUNCI

Sarekat Rakyat, Partai Komunis Indonesia, Tan Malaka, Mestika Zed, *Hermes dilemma*.

PENGANTAR

Pemberontakan Komunis Silungkang 1926–1927 di Sumatera Barat adalah satu perlawanan rakyat terhadap pemerintah kolonial Belanda yang terkenal di Indonesia. Pemerintahan Republik Indonesia di bawah Presiden Soekarno secara resmi telah mengakui perlawanan ini sebagai bagian dari Pergerakan Kebangsaan, dan para pemimpin perlawanan ini telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan.² Kepada mereka dan janda/ahli warisnya, pemerintah memberikan tunjangan hidup. Semua kejadian itu menjadi kebanggaan bagi penduduk Silungkang, Sumatera Barat pada umumnya, dan tokoh lain yang terlibat dalam perlawanan itu.

Penyebutan suatu gerakan perlawanan rakyat di Hindia-Belanda dicurigai mengandung bias pandangan politis penguasa dan para penulis sejarah. Penguasa kolonial Belanda yang antikomunis dan para penulis sejarah dari negara kapitalis Amerika menyebut apa yang terjadi di Silungkang pada 1926–1927 itu *Der Communistische Beweging*, atau *The Communist Uprisings*, atau *The Communist Rebellion*. Sebutan itu tercantum dalam laporan resmi kolonial dan tulisan ilmiah, antara lain dari Blumberger (1941), Schrieke (1955), dan Benda dan McVey (1960). Pemberontakan Silungkang dikaitkan dengan empat faktor utama, yaitu Gerakan Komunis Internasional, Gerakan Komunis Hindia-Belanda, Gerakan Komunis di Sumatera Barat, dan Kondisi sosial-ekonomis Sumatera Barat yang parah setelah Perang Dunia Pertama yang disertai *belasting* yang tinggi (a.l. Benda & McVey, 1960; Schrieke, 1955; de Haan, 1928).

Sebutan pemberontakan komunis tersebut kemudian disalin oleh sejarawan Indonesia karena tulisan itulah yang menjadi sumber utama tulisan mereka. Penggunaan sebutan itu mungkin disebabkan oleh kekurangpahaman para sejarawan Indonesia dan kekurangsadaran akan kandungan ideologis politik, dalam sumber tulisan asing itu. Kemungkinan lain disebabkan oleh begitu kuat bukti-bukti pengaruh ideologi dan gerakan komunis dalam peristiwa itu. Apa pun alasannya, kemudian peristiwa itu akhirnya dikenal sebagai Pemberontakan Komunis Silungkang 1927, sebagaimana judul buku Mestika Zed (2004).

Sebutan Pemberontakan Komunis Silungkang tersebut tidak disepakati oleh para pelaku, para ahli waris, dan anak Nagari Silungkang. Salah seorang pelaku pemberontakan, yaitu A. Muluk Nasution, menyebut peristiwa itu dalam bukunya *Pemberontakan Sarekat Rakyat Silungkang Sumatera Barat 1926–1927*. Seterusnya, pada tugu peringatan yang dibangun oleh penduduk di Nagari Silungkang pada 1947, tertera tulisan *Pemberontakan Rakyat Silungkang 1927*. Seorang penduduk Silungkang yang terpelajar, Nawir Said, menyebut pemberontakan itu perlawanan rakyat Silungkang (2005). Pendapat itu juga telah dikemukakan secara bersama oleh penduduk lokal Silungkang dalam sebuah seminar nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto pada 12 Maret 2005. Tidak ada satu pun yang menambahi dengan label *komunis*. Semua cara penyebutan ini, kata mereka, dilakukan bukan karena takut akan stigma komunis yang diciptakan Soeharto. Apa yang mereka kemukakan merupakan maksud untuk meluruskan peristiwa itu menurut interpretasi mereka sendiri. Bagaimana sebenarnya hubungan antara komunis dan perlawanan

2 Peraturan Presiden R.I. No. 39/1958; No. 20 Tahun 1960; dan No. 5/1964.

rakyat Silungkang sehingga perlawanan itu disebut dalam laporan Belanda sebagai gerakan komunis? Pertanyaan itulah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dan menulis makalah ini, yaitu untuk memperlihatkan bukti bahwa penyebutan Pemberontakan Komunis Silungkang adalah tidak tepat.

Berbeda dengan buku Mestika Zed dan tulisan asing, makalah ini akan memperlihatkan bahwa perlawanan rakyat Silungkang tidak direncanakan, dikelola, dijalankan, dan didanai oleh Partai Komunis Indonesia, tetapi oleh penduduk Silungkang dan nagari-nagari sekitarnya yang tergabung dalam organisasi Sarekat Rakyat (pecahan dari Sarekat Islam), yang bekerja sama dengan Perserikatan Kaum Buruh Tambang (PKBT) Sawahlunto, dan dua orang tentara Belanda Sawahlunto, yaitu Sersan Mayor Pontoh dan Sersan Rumuat. Keterlibatan Partai Komunis Indonesia hanyalah dalam mengkoordinasi hari pemberontakan (*D Day*) agar dapat dilaksanakan secara bersama dengan cabang-cabang PKI di Jawa. Karena organisasi utama yang melakukan pemberontakan itu adalah Sarekat Rakyat, yang berjuang atas dasar ideologi *fisabilillah*, saya cenderung untuk menyebut perlawanan ini sebuah Gerakan Islam Revolusioner, bukan Pemberontakan Komunis Silungkang.

ULASAN BUKU MESTIKA ZED

Pertama, kita mulai tulisan ini dengan membahas buku Mestika Zed *Pemberontakan Komunis Silungkang 1927; Studi Gerakan Sosial di Sumatera Barat* (2004). Tulisan dalam buku ini berasal dari naskah skripsi S-1 yang diserahkan kepada Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 1980. Menurut Zed, buku ini tidak ada perubahan yang maknawi dibandingkan naskah skripsinya. Satu hal yang disesalkan dari Zed adalah kelalaiannya dalam menggunakan *oral history*, baik yang langsung bersumber dari pelakunya maupun dari mereka yang mengetahui peristiwa tersebut. Ketika Zed menulis skripsinya pada 1980, sejarah Pemberontakan Rakyat Silungkang mungkin masih dapat dikategorikan sebagai sejarah kontemporer karena beberapa pelaku Pemberontakan Silungkang masih hidup, antara lain A. Muluk Nasution, Ibu Salamah, dan Buyung Sutan Sinaro. Jika Zed sempat mewawancarai para pelaku itu, apalagi kalau sempat membaca buku Nasution dengan cermat, tentu akan lain isi tulisannya.

Untuk penulisan buku tersebut, sumber utama yang digunakan Zed adalah dokumen surat kabar, arsip kolonial, dan tulisan para pakar sejarah politik. Meskipun Zed mengatakan telah berlaku kritis terhadap kesahihan isi sumber-sumber itu, bias mungkin saja datang dari ketidakutuhan laporan yang dikutip. Bahwa ada bagian-bagian tertentu dari keadaan atau kejadian yang dikorup oleh pihak pelapor peristiwa Pemberontakan Silungkang yang memang menjadi kaki tangan pemerintah kolonial. Korupsi seperti itu, baik dalam bentuk penyelewengan fakta, pengurangan atau penambahan keterangan mengenai fakta, maupun interpretasi fakta, disebut oleh Vincent Crapanzano *Hermes dilemma*. Dilema itu mungkin terjadi karena terdapat faktor asal bapak senang atau bias pandangan kolonial pada pihak pelapor (Crapanzano 1986, 51–76). Salah satu korupsi dalam laporan itu adalah tidak dinyatakan secara jelas organisasi yang menggerakkan secara langsung perlawanan Silungkang: apakah PKI atau Sarekat Rakyat. Bias lain adalah kecenderungan umum petugas kolonial Belanda yang kurang memperhatikan secara cermat kehidupan poleksosbud perdesaan Indonesia sehingga “hanya sedikit yang mereka ketahui tentang kondisi yang sebenarnya dari kepemimpinan di perdesaan selama masa kolonial,” kata Antlov & Cederroth (2001, 3). Padahal, kita mengetahui bahwa gerakan ini berlangsung di daerah perdesaan dan semua pemimpin terasnya adalah penduduk perdesaan.

Dalam buku ini, Zed melihat pemberontakan Silungkang sebagai gambaran hubungan lokal dengan nasional. Pemberontakan Silungkang adalah respons, atau gerakan sosial, atau *internal war* yang dilancarkan

oleh penduduk setempat terhadap pengaruh sosial-ekonomi yang datang dari aras nasional (Zed 2004, 5, 6, 10). Tiga faktor utama yang ditengarai oleh Zed sebagai pencetus pemberontakan ini adalah

- 1) penetrasi sistem ekonomi uang dari pusat sampai ke daerah,
- 2) intensitas sistem pemerintahan kolonial, dan
- 3) reaksi masyarakat lokal atas kedua faktor di atas.

Meskipun demikian, ditanyakan oleh Zed, jika ketiga faktor ini berlaku untuk seluruh kawasan Minangkabau (Sumatera Barat), mengapa cetusan pemberontakan yang nyata hanya muncul di Silungkang? Adalah menggembirakan, dalam kata pengantarnya, Mestika Zed menggarisbawahi pentingnya memperhatikan faktor unik lokal Silungkang dalam pemberontakan ini. Sehubungan dengan hal itu, Zed menanyakan: *"Kondisi-kondisi lokal bagaimanakah yang menyebabkan menonjolnya tingkat intensitas orang-orang atau kelompok yang melibatkan mereka ke dalam situasi pemberontakan itu?"* (Zed 2004, 12). Namun demikian, sayang sekali, bahwa pertanyaan ini tinggal dalam kata pengantar saja. Kurang terjawab secara eksplisit dalam bab-bab bukunya.

Beberapa hal penting yang belum jelas duduk perkaranya dalam buku Mestika Zed adalah

- 1) Apakah perlawanan Silungkang merupakan pemberontakan komunis atas perlawanan rakyat lokal yang tergabung dalam Sarekat Rakyat?
- 2) Mengapa perlawanan itu dipimpin oleh Orang Silungkang? Bukan Orang Padang Sibusuk, Tanjung Ampalu, atau Tarung-tarung? Bagaimana kondisi khas politik-ekonomi-sosial dan kultural (poleksoskul) Silungkang yang berkaitan erat dengan kemunculan perlawanan ini?
- 3) Bagaimana hubungan antara Sarekat Rakyat Silungkang dengan Perserikatan Kaum Buruh Tambang (PKBT) Sawahlunto, dan dengan Sersan Mayor Pontoh serta Sersan Rumuat, anggota militer Belanda, di Sawahlunto.
- 4) Bagaimana perlawanan direncanakan, dibiayai dan dilaksanakan? dan
- 5) Mengapa perlawanan itu terus dilakukan, padahal mereka tahu bahwa pemberontakan-pemberontakan komunis di tempat lain (Jawa) beberapa bulan sebelumnya gagal? Mengapa perlawanan terus dilakukan meskipun tidak disetujui oleh Tan Malaka, padahal Sarekat Rakyat Silungkang (melalui Arif Fadillah) lebih menurut kepada Tan Malaka, daripada kepada Komite Sentral PKI di Jawa?

Pertanyaan-pertanyaan di atas telah dijadikan panduan dasar dalam penelitian yang dilakukan penulis untuk membuktikan ketidaktepatan penyebutan Pemberontakan Komunis Silungkang. Jawaban pada pertanyaan-pertanyaan di atas juga akan digunakan untuk melengkapi kekurangan paparan dan analisis yang dilakukan oleh berbagai penulis atas peristiwa itu, khususnya tentang latar belakang poleksos dan kultural Nagari Silungkang, baik semasa peristiwa gerakan itu terjadi maupun latar pada masa kini. Latar belakang poleksoskul Silungkang perlu untuk memahami dengan lebih baik faktor-faktor dan proses gerakan ini. Penambahan ini bersumber dari tulisan-tulisan penulis lokal (Said 2005; Sirin 2002; Marzali & Siburian 1998; Nasution 1981; Marzali 1973).

KONDISI SOSIAL-POLITIS SILUNGKANG

Silungkang adalah sebuah nagari atau komunitas tradisional yang mulanya berada dalam lingkungan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, setelah Sawahlunto menjadi Kota Madya tahun 1990. Nagari Silungkang menjadi sebuah Kecamatan yang terdiri atas lima desa, dalam lingkungan Kota Madya Sawahlunto. Masyarakat Nagari Silungkang adalah bagian dari masyarakat matrilineal-matrilokal Minangkabau. Seluruh penduduk beragama Islam, terbagi ke dalam dua *moiety*, yang pecah menjadi lima suku (*clan*), dan seterusnya pecah lagi ke dalam 18 kampung (*subclan*), dan 18 kampung itu pecah ke dalam 29 perut (*lineage*). Terakhir, setiap perut itu terdiri atas satu sampai dua rumah gadang. Sampai kini belum diperoleh data tentang jumlah rumah gadang dalam Nagari Silungkang.³

Pada masa kejadian pemberontakan, di Silungkang terdapat sebuah Sekolah Dasar Tiga Tahun yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial, yang diikuti oleh anak-anak Silungkang yang berkecukupan. Institusi pendidikan tradisional yang sudah berlangsung sejak lama adalah pendidikan agama di surau (pesantren). Para orang tua di Silungkang mewajibkan anak mereka untuk mengikuti pendidikan di surau itu. Setelah tamat di surau, pendidikan agama dilanjutkan ke sekolah diniyah. Dengan demikian, pada masa itu sebagian besar anak-anak Silungkang, khususnya anak lelaki, mempunyai kemampuan tulis baca huruf latin dan khatam mengaji Al-qur'an.

Pada masa lalu, nagari adalah sebuah masyarakat hukum (*rechtsgemeenschap*) yang menghidupi dirinya sendiri (*self-sufficient*), mempunyai wilayah sendiri dan pemerintahan sendiri yang otonom. Nagari Silungkang tradisional dipimpin oleh seorang *Penghulu Pucuk* yang dalam urusan kekerabatan dibantu oleh lima *Penghulu Suku* dan 14 *Datuk Kampung*, sedangkan dalam urusan administrasi, *Penghulu Pucuk* dibantu oleh seorang monti (sekretariat), seorang dubalang (keamanan), seorang malim (urusan agama), dan seorang pesuruh. Pada zaman kolonial Belanda, *Penghulu Pucuk* diubah fungsinya menjadi Kepala Nagari, setelah tahun 1980 berganti lagi menjadi Kepala Desa. Terakhir setelah gerakan reformasi tahun 2002, Nagari Silungkang berubah menjadi sebuah kecamatan yang terdiri atas lima desa.

KEGIATAN EKONOMI

Pada awalnya, mata pencarian utama penduduk Nagari Silungkang adalah bersawah dan berladang. Sawah dan ladang yang dimiliki bersama oleh kelompok *perut*. Luas seluruh sawah milik penduduk Nagari Silungkang adalah antara 1.0 km² dan 1.5 km², yang terletak di pusat nagari, di jorong Rumbio dan di Desa Muara Kalaban. Menurut perhitungan teori daya dukung lingkungan (*carrying capacity*), luas sawah ini diperkirakan cukup untuk menghidupi sekitar 150 sampai 200 rumah tangga petani. Jika satu rumah tangga mempunyai anggota rata-rata 4 sampai 5 jiwa, Nagari Silungkang mempunyai daya dukung yang cukup untuk sekitar 750 sampai 1000 jiwa penduduk. Pada 1920, menurut satu sumber Belanda yang dikutip Zed dan Nasution, Silungkang berpenduduk sekitar 300 rumah tangga (Zed 2004, 112; Nasution 1981, 45). Dengan demikian, jumlah penduduk Silungkang pada masa itu diperkirakan antara 1200 dan 1500 orang. Jadi pada 1920, jumlah penduduk Silungkang sudah melampaui daya dukung lahan pertanian sawah dan ladang yang dalam istilah teknis telah terjadi *population pressure*.

Bilakah gejala *population pressure* bermula di Silungkang? Jumlah maksimal 150 sampai 200 rumah tangga diduga sudah terlampaui pada sekitar tahun 1880. Untuk mengatasi gejala *population pressure*, jalan keluar yang dipilih oleh Orang Silungkang adalah kaum perempuan bertenun kain songket manakala

³ *Moiety* dan *subkampung* adalah istilah teknis antropologi. *Suku*, *kampung*, *rumah gadang*, *sapariduan* dan *bilik* adalah istilah lokal Silungkang.

kaum laki-laki pergi merantau berniaga. Berdasarkan perhitungan di atas, dan juga hasil wawancara dengan beberapa informan, tradisi merantau pada Orang Silungkang memang telah dimulai sejak sekitar suku terakhir abad ke-19 itu (Marzali 1973).

Dalam buku dokumen C.v.O. Conferentie Siloenkang ke I (1940?) dikatakan bahwa pada masa awal merantau sebelum abad ke 20, orang Silungkang pergi ke daerah dalam lingkungan Minangkabau saja, yaitu Bayang di Pesisir Selatan, Muara Labuh di Solok Selatan, Padang, Air Molek (Riau). Sejak sekitar tahun 1905, perantau Silungkang dikatakan mulai merambah ke Jawa, "*Semoea kota-kota besarnja didoedoe kinja...*" (C.v.O. Conferentie Siloenkang ke I 1940?, 47–48). Setelah masuk abad ke 20, mereka mulai merantau ke daerah-daerah yang lebih jauh seperti Medan, Jambi, Kuantan, Rengat, dan seterusnya ke Jawa dan Malaya. Pada 1940 daerah perantauan Orang Silungkang sudah melebar ke seluruh Indonesia dan Semenanjung Malaya, sebagaimana digambarkan dalam tabel di bawah ini.

Sumatera Barat		Jambi, Riau, Sumut, dan Sumsel		Jawa, Maluku, dan Malaya	
I		II		III	
1.	Durian (Sawah Lunto)	9.	Jambi	13.	Jawa
2.	Sungai Basoeng		• Tanah Tumbuh		• BataviaCentrum
3.	Pulau Punjung		• Muaro Tebo		• Pekalongan
4.	Padang		• Bangko		• Solo
5.	Solok				• Tasikmalaya
6.	Bukittinggi	10.	Riau		• Surabaya
7.	Koto Baru		• Kuantan		
8.	Muaro Labuh		• Air Molek	14.	Ambon (Maluku)
	Batusangkar		• Rengat		
			• Tembilahan	15.	Malaya
			• Kuala Enok		• Johor
		11.	Sumatra Utara		• Kuala Lumpur
			• Medan		• Penang
			• Belawan		• Muar
		12.	Sumatra Selatan		
			• Lahat		
			• Pagaram		

Tabel 1. Sebaran Daerah Perantauan Orang Silungkang (1940).

Gerakan merantau pada awalnya adalah untuk membawa barang dagangan hasil tenun songket. Tenun songket adalah industri rakyat tradisional Silungkang yang dikerjakan oleh kaum perempuan di rumah, sedangkan perniagaannya ke luar dikelola oleh kaum laki-laki. "Usaha pertenunan kain inilah yang menjadikan Silungkang termasyhur di seluruh Indonesia, bahkan juga sampai ke luar negeri," kata Nasution (1981, 45). Pada awal abad ke-20 perusahaan perdagangan songket yang terkenal antara lain adalah Datuk Sati & Co, Muchtar & Co, dan Sulaiman Labai & Zoon, yang berpusat di Nagari Silungkang dan mempunyai cabang di Padang, Batavia, dan Surabaya. Untuk memajukan usaha itu, pemerintah kolonial Belanda telah

membuka sebuah cabang Kantor Pos di Silungkang pada 1918. Para peniaga memasang iklan di koran di Padang, Batavia, Surabaya, dan juga menyebarkan katalog dan selebaran ke semua kota besar di Indonesia, bahkan sampai ke Eropa. Ratusan ribu gulden setiap bulan mengalir masuk ke Nagari Silungkang melalui pesanan songket yang dilayani oleh Kantor Pos Silungkang (Nasution 1981, 46). Itulah kelebihan Orang Silungkang dibandingkan masyarakat nagari lain di sekitarnya, yaitu semangat dan keterampilan wirausaha (*entrepreneurship*), kata Nasution (1981, 46).

PSIKOLOGI ORANG SILUNGKANG

Di bawah ini akan diuraikan beberapa karakter Orang Silungkang menurut penglihatan orang luar Silungkang, Sumatera Barat (Marzali & Siburian 1998, 109–123). Karakter pertama, orang luar, khususnya orang Minangkabau, cenderung melihat orang Silungkang sebagai manusia yang tinggi hati. Karakter itu tercermin dari gaya berbicara yang selalu meninggikan dan memandang remeh orang lain. Perilaku itu mungkin terjadi karena capaian mereka yang tinggi dibandingkan nagari di sekitarnya. Karakter kedua orang Silungkang adalah individualistis. Mereka kurang mampu mengatur bekerja secara bersama meskipun semangat untuk bekerja bersama selalu besar. Mereka hidup untuk diri sendiri dan keluarga sendiri.

Ketiga, orang Silungkang cenderung menilai kedudukan sosial seseorang berdasarkan capaian materiel (ekonomi). Seseorang yang kaya dinilai lebih tinggi daripada yang miskin. Orang kaya dianggap sebagai manusia yang berhasil di dunia. Pada zaman kolonial, kedudukan pegawai pemerintah tidak begitu dihargai. Hal itu terjadi karena sikap antipemerintah kolonial. Pada zaman setelah merdeka, keengganan menjadi pegawai pemerintah itu terjadi karena begitu kecilnya gaji pegawai. Keempat, orang Silungkang memerlukan waktu yang lama untuk dapat mempercayai seseorang. Mungkin itu terjadi karena sudah lama mengidap mental pedagang. Setiap orang dianggap mencari untung bagi dirinya sendiri. Akibatnya, secara umum, dalam pergaulan sosial, orang Silungkang berkesan kurang ramah, kurang senyum, kurang tahu tata krama, kurang lemah lembut, kurang pandai berbasa-basi, kurang memperhatikan penampilan diri (kurang *segak*).

Kelima, orang Silungkang cenderung kritis dan berbicara secara langsung (*stright to the point*). Mereka tidak suka pembicaraan yang bertele-tele, basa-basi yang berlebihan. Itu semua dianggap membuang-buang waktu. Keenam, kebanyakan orang Silungkang tidak puas akan keadaan mereka, sering mengomel dan mengeluh, bagai orang yang tidak pernah puas akan apa yang dipunyai. Orang Silungkang, sebagaimana orang Minangkabau pada umumnya, adalah manusia yang gelisah, seolah-olah ada sesuatu yang hilang belum ditemukan, atau *manggiriek* dalam bahasa Silungkang. Itu mungkin terjadi karena sistem kekerabatan matrilineal yang diikuti oleh sistem menetap matrilineal. Dalam sistem itu secara struktural laki-laki tidak punya tempat dalam rumah tangga. Rumah adalah milik istri, tempat bergaul kaum kerabat istri di siang hari. Di rumahnya sendiri, yaitu di rumah ibunya, pada malam hari ada *urang sumando* yang harus mereka seani karena adat *avoidance relationship*.

Ketujuh, karakter umum orang Silungkang adalah tidak akrab dengan dunia birokrasi dan struktur sosial hierarkis. Dunia birokrasi baru mulai dimasuki oleh generasi muda setelah merdeka pada tahun 1950-an, setelah beberapa anak Silungkang lulus dari perguruan tinggi. Sikap kritis, sombong, dan merasa diri pandai membuat mereka terlalu kritis terhadap pimpinan. Ditambah dengan kebiasaan bebas bersuara dan persamaan derajat telah menghalangi mereka untuk berhasil dalam dunia birokrasi yang berdasarkan struktur hierarki jabatan.

KEPELOPORAN MASYARAKAT SILUNGKANG

Di luar dari hal-hal yang sudah diuraikan di atas, Silungkang dapat digambarkan sebagai sebuah komunitas desa yang telah berperan sebagai pelopor dalam berbagai aspek kehidupan dan pencapaian kemajuan di daerah sekitarnya. Di bawah ini diberikan beberapa contoh kasus kepeloporan masyarakat Silungkang.

1. Pada 1893, jalan kereta api dari Sawahlunto ke pelabuhan laut Emma Haven di Padang telah selesai dibangun, melintasi Nagari Silungkang. Kemudian jalan kereta api lintas Sawahlunto-Padang itu disusul dengan pembangunan jalan darat. Sarana transportasi itu memberi fasilitas bagi orang Silungkang untuk merantau ke luar, khususnya ke Padang. Selanjutnya, dari Padang mereka meneruskan perjalanan perantauan ke Jawa. Seperti telah dipaparkan pada bagian terdahulu, sampai 1940 perantau Silungkang dapat ditemukan di 29 kota di seluruh Indonesia dan Semenanjung Malaysia.
2. Pada 1910, dua orang penenun songket perempuan dikirim oleh pemerintah kolonial Belanda untuk memperagakan pertunjukan songket Silungkang di Pekan Raya *Teenton stelling* di Belgia. Kesiapan pemerintah kolonial Belanda mendukung pengiriman itu tentu didasarkan pada sesuatu yang istimewa dalam industri pertenunan Silungkang.
3. Pada 1918 kantor pos dibuka di Silungkang oleh pemerintah kolonial Belanda untuk memberi fasilitas bagi kemajuan perniagaan hasil pertenunan melalui pengiriman pos.
4. Pada akhir Perang Dunia Pertama, pada 1918, terjadi kelaparan di Silungkang karena kekurangan beras. Anggota Sarekat Islam setempat, di bawah pimpinan pedagang songket kaya Sulaiman Labai, setelah mempelajari distribusi beras melalui jalur kereta api yang meliwati Silungkang dan juga telah membaca Undang-Undang Darurat Perang, telah menghentikan kereta api yang membawa beras dari Solok ke Sawahlunto di stasiun Silungkang. Dengan mengancam kepala stasiun dan masinis, mereka membongkar dua gerbong beras untuk dibagi-bagikan kepada rakyat Silungkang. Setelah itu, Sulaiman Labai membayar uang kepada masinis kereta api sesuai dengan harga beras yang diambarnya. Itu adalah satu tindakan berani dan bertanggung jawab yang penuh perhitungan. Atas perbuatan itu, Sulaiman Labai dan Bagindo Ratu diinterogasi dan ditahan di Sawahlunto selama tiga hari, dengan peringatan untuk tidak mengulang perbuatan melanggar hukum itu. Setelah itu, pemerintah mendistribusikan beras secara teratur kepada penduduk Silungkang. Apa yang dilakukan Pimpinan Sarekat Islam di atas adalah satu keberanian dengan penuh perhitungan dan tanggung jawab.
5. Pada awal 1927 terjadi perlawanan rakyat menentang pemerintah kolonial di bawah pimpinan tokoh-tokoh Sarekat Rakyat Silungkang. Kejadian itu, dibicarakan dalam makalah ini.
6. Setelah sebagian pejuang Silungkang bebas dari penjara Belanda, sekitar 1935, Silungkang memulai usaha pertenunan alat tenun bukan mesin (ATBM), yang memproduksi tekstil. Peralatan dan teknologinya dipelajari oleh bekas pejuang itu dari industri tenun Majalaya di Jawa Barat.
7. Pada 1938, dua orang pemuda Silungkang mendapat beasiswa untuk belajar ke luar negeri, seorang ke Jepang (A. Aziz Moehammad dari kampung Sungkiang) dan seorang lagi ke British India (Mohamad Jasin dari Kampung Panai Empat Rumah) (C.v.O. *Conferentie Siloengkang* ke I 1940?, 28–29).
8. Pada 11 sampai 15 Desember 1939, para perantau Silungkang dari berbagai tempat di Nusantara dan Malaya menyelenggarakan sebuah konferensi. Salah satu hasil dari konferensi itu adalah pembangunan sebuah Sekolah Menengah Pertama atas usaha, daya, dan biaya sendiri (CvO

- Conferentie Siloengkang* ke I, 1940?). Sekolah itu mereka beri nama Sekolah Dagang Islam (SDI), sesuai dengan nama awal Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo pada 1905. Sejak tahun 1980-an sekolah itu membuka pula Sekolah Menengah Atas. Semuanya dikelola dan didanai oleh penduduk lokal.
9. Pada 1947, instalasi listrik masuk Nagari Silungkang atas usaha anak negeri yang meminta langsung kepada Wakil Presiden Hatta, ketika beliau berkunjung meresmikan Tugu Pemberontakan Rakyat Silungkang.
 10. Mempertimbangkan kemajuan industri tekstil, pada 1965, BNI membuka cabang di nagari ini. Sementara itu, di tempat lain, pada tingkat Kecamatan, BNI, sebagai bank besar, belum membuka cabangnya.
 11. Pada 1965, jaringan telepon masuk nagari dan pelanggannya melebihi jumlah pelanggan di kota Sawahlunto.
 12. Pada zaman kolonial Belanda, pedagang perantau Silungkang berhasil membangun toko-toko besar di kota besar di Indonesia: Toko Mawar di Surabaya, Toko Padang di Blitar, Toko Padang, Toko Panay, dan Toko Nusantara di Solo, Toko Merah di Pasar Senen Jakarta, Toko Irian dan Fa. Abdul Fatah St Malano di Padang, dan lain-lain. Sampai 1970, perniagaan tekstil di Pasar Tanah Abang Jakarta didominasi oleh pedagang Silungkang. Sampai kini pedagang Silungkang masih mendominasi Pasar Tanah Abang Jakarta dalam perdagangan garmen konfeksi.
 13. Pembangunan gedung pertemuan umum Persatuan Keluarga Silungkang di Jalan Gotong Royong, Cileduk, Tangerang Selatan, di atas tanah seluas 1800 meter persegi yang dibeli dengan harga 65 juta rupiah, pada 1990.
 14. Pembangunan Masjid Raya Silungkang dengan biaya 650 juta rupiah pada 1994.

KEBANGKITAN NASIONALISME INDONESIA DI SILUNGKANG

Pada mulanya, organisasi politik nasionalis yang dibentuk dan digerakkan oleh rakyat Silungkang di Silungkang, yang seluruh penduduknya beragama Islam, ialah Sarekat Islam pada 1915. Sarekat Islam Silungkang terinspirasi oleh gerakan Sarekat Islam di Jawa yang telah menyusup masuk ke Sumatera Barat. Pembentuk dan penggerak organisasi itu adalah para pedagang, yang sebagian adalah haji. Di Silungkang, organisasi itu pada awalnya dipimpin oleh Sulaiman Labai, Bagindo Ratu, Talaha Sutan Langit dan lain-lain (Nasution 1981, 47; Zed 2004, 115).

Dalam pada itu, di Jawa, sejak 1916 justru mulai terlihat gejala perpecahan dalam organisasi Sarekat Islam. Dalam Kongres Sarekat Islam (SI) ke-3 di Bandung pada 1916, Semaun, sebagai wakil Sarekat Islam Surabaya, yang kemudian memimpin Sarekat Islam Cabang Semarang, menentang kebijakan pimpinan Sarekat Islam (pimpinan Tjokroaminoto, Agus Salim, dan Abdul Muis) yang bersikap kooperatif terhadap penjajah Belanda dan bersedia duduk di *Volksraad*. Sikap revolusioner Semaun itu didukung oleh tokoh Sarekat Islam lain yang pada waktu itu juga merangkap menjadi anggota *Indische Sociaal Demoratische Vereeniging* (ISDV), seperti Darsono, Tan Malaka, dan Alimin. Mereka membentuk apa yang disebut Sarekat Islam Merah untuk memisahkan diri mereka dari Sarekat Islam Putih yang kooperatif.

Pada 1920, organisasi ISDV mengubah namanya menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Dengan demikian, makin jelas bahwa sejak 1920, di dalam tubuh Sarekat Islam terdapat dua faksi utama yang ideologinya bertentangan, yaitu faksi Sarekat Islam Putih yang kooperatif melawan faksi Sarekat Islam Merah yang komunis dan radikal. Dalam Kongres Sarekat Islam di Yogyakarta tahun 1921, pimpinan Sarekat Islam

melarang anggotanya merangkap dua partai. Mereka yang menjadi anggota PKI dan bergabung dalam Sarekat Islam Merah dikeluarkan dari Sarekat Islam (Nasution 1981, 33; Zed 2004, 52).

Keputusan pimpinan Sarekat Islam tersebut disambut oleh Kongres PKI di Bandung 4 Maret 1923, yang dihadiri 16 cabang PKI dan 14 cabang Sarekat Islam Merah, dan beberapa organisasi buruh yang berada di bawah naungan PKI. Kemudian PKI mengonsolidasi semua cabang Sarekat Islam Merah dan meletakkannya di bawah naungan (*onderbouw*) organisasi PKI, mengubah namanya menjadi Sarekat Rakyat (Nasution 1981, 33). Setelah itu PKI bergabung dengan Komunis Internasional (Komintern).

Karena organisasinya yang berwawasan internasional lebih mengutamakan perlawanan terhadap kapitalis daripada terhadap penjajah, lebih mengutamakan dukungan kaum proletar daripada petani, apalagi pedagang (*borjuis*), dan tidak bersahabat dengan agama, PKI merasa sulit berkembang di Indonesia. Karena itu pada masa awal, pengembangan organisasi Sarekat Rakyat-lah yang terutama diandalkan oleh PKI (Zed 2004, 53). Strategi itu telah ditegaskan oleh surat dari Moskow pada 1925, *"The task of Communist Party of Indonesia is... to attract to it the broad masses of the people... There is no single country in the world where the proletariat can count on success in the struggle unless it obtains the active support of the majority of the peasantry"* (Benda & McVey 1960, 138). Yang dimaksudkan *peasantry* di sini adalah yang tergabung dalam Sarekat Rakyat, yang memang sudah berada dalam genggaman PKI. Keadaan itu secara eksplisit juga disuarakan oleh Tan Malaka: *"Our tactics vis-avis the nationalist and religion revolutionaries must be to attract them to Sarekat Rakyat"* (Benda & McVey 1960, 139).

Strategi pengembangan Sarekat Rakyat ini mendapat sambutan baik di Sumatera Barat. Pimpinan cabang dan anak cabang Sarekat Islam Sumatera Barat cenderung ke aliran radikal, yang *berjihad fisabilillah* melawan penjajah Belanda, dan sebaliknya tidak bersimpati pada Sarekat Islam Putih yang beraliran kooperatif (Nasution 1981, 36). Setelah kembali dari Jawa, seorang tokoh Sarekat Islam Sumatera Barat, Hadji Ahmad Chatib gelar Datuk Batuah dibantu oleh Djamaluddin Tamin dan Natar Zainuddin melebur Sarekat Islam menjadi Sarekat Rakyat, yang dengan demikian berarti masuk ke bawah naungan dan komando (*onderbouw*) PKI.⁴

Bagaimanapun, karena Hadji Datuk Batuah adalah seorang guru yang cerdas di sekolah agama Islam terkenal Thawalib Padang Panjang, lulusan terkemuka Hadji Rasul di Mekah pada 1909–1915, tidak mudah menuduh semena-mena bahwa Hadji Datuk Batuah berideologi komunis. Diperlukan satu wacana yang sangat hati-hati untuk menjawabnya. Saya agak sukar menerima pernyataan Zed bahwa di Thawalib Padang Panjang ini "... ajaran komunisme dikembangkan lebih bercorak keislaman. Arsitek utamanya ialah Hadji Ahmad Chatib gelar Datuk Batuah, dibantu oleh Djamaluddin Tamin dan Natar Zainuddin" (Zed 2004, 56). Bagi saya, paha yang dikembangkan oleh Hadji Datuk Batuah bukan komunisme bercorak keislaman di dalam institusi PKI, tetapi Islam yang revolusioner di dalam institusi Sarekat Rakyat, yang bernaung di bawah PKI. Hadji Datuk Batuah bukanlah seseorang yang dapat begitu saja menerima ideologi komunis dan kemudian menyebarkan di Thawalib Padang Panjang, tempat beliau mengajar.

Memang, ada titik temu antara komunisme bercorak keislaman (PKI) dan Islam yang revolusioner (Sarekat Rakyat), tetapi tidak mudah menyatakan bahwa keduanya sama. Begitu juga, memang secara resmi Sarekat Rakyat berada di bawah naungan Partai Komunis Indonesia, tetapi tidak mudah mengatakan bahwa Sarekat Rakyat di Sumatera Barat adalah *onderbouw* yang patuh dan taat, tidak mempunyai kebebasan dan karakter tersendiri, dalam lingkungan Partai Komunis Indonesia. Yang benar, menurut saya adalah hubungan antara Sarekat Rakyat di bawah pimpinan Hadji Datuk Batuah dan Partai Komunis Indonesia bersifat saling

4 Zed mengatakan Hadji Datuk Batuah kembali ke Sumatera Barat dari lawatannya ke Aceh dan Jawa pada 1924 (Zed 2004, 58), padahal beliau sudah ditangkap Belanda di Sumatera Barat pada 11 November 1923, dan dibuang ke Timor 12 Januari 1925 (Zed 2004, 61). Tampaknya ada kesalahan cetak angka tahun pada Zed (2004, 58).

membutuhkan, yaitu satu *simbiosis mutualistis*. Sarekat Rakyat yang berlandaskan Islam revolusioner di bawah pimpinan Hadji Datuk Batuah membutuhkan *ilmu kuminih* (yaitu metode organisasi dan aksi massa komunis) untuk memungkinkan Sarekat Rakyat digerakkan dengan efektif melawan penjajah Belanda.

Di pihak lain, PKI membutuhkan Sarekat Rakyat untuk mendapatkan himpunan massa pendukung. PKI sendiri membiarkan Sarekat Rakyat berkembang dan bergerak sendiri tanpa mengikatnya dengan ketat ke dalam organisasi PKI. "*The Sarekat Rakyat must be gradually separated from the Communist Party of Indonesia and be converted into a genuine national, revolutionary organization, working in conjunction with and under the intellectual leadership of the Communist*," demikian dikatakan dalam sebuah instruksi dari Moskow (Benda & McVey 1960, 139). Jadi, apa yang dibutuhkan oleh Sarekat Rakyat dari PKI, dan apa yang diberikan oleh PKI kepada Sarekat Rakyat adalah *the intellectual leadership of the Communist*.

Bagaimanapun, sebenarnya para pemimpin tingkat bawah Sarekat Rakyat Sumatera Barat, apalagi anggota biasa yang terdiri atas petani dan pedagang, tidak mengetahui secara jelas perbedaan antara doktrin agama Islam dan ideologi Komunis. Mereka juga tidak begitu menyadari strategi Partai Komunis Indonesia yang menjadikan Sarekat Rakyat sebagai jembatan untuk menyeberang ke Partai Komunis Indonesia. Semua itu berada di luar batas kemampuan pikiran dan pengetahuan mereka sebagai *inlander* dengan tingkat pendidikan yang terbatas. Pada masa itu, setiap cabang Sarekat Islam di Sumatera Barat, yang telah berubah menjadi Sarekat Rakyat pada 1924, apalagi anak-anak cabangnya, mempunyai kedaulatan sendiri. Mereka meneruskan cara berorganisasi pada masa Sarekat Islam. Hubungan antara pengurus besar dan cabang serta anak cabang dapat dikatakan sangat longgar. Setiap cabang dan anak cabang mempunyai kedaulatan sendiri (Sirin 2002).

Organisasi lokal secara dominan dijalankan oleh kebijakan pemimpin lokal. Pengaruh pimpinan lokal pada organisasi sangat dominan. Buktinya Sarekat Islam Silungkang di bawah pimpinan Sulaiman Labai pada 1918 membongkar secara paksa dua gerbong kereta api berisi beras, kemudian membagikan berasnya kepada penduduk Silungkang yang kelaparan. Tindakan itu diambil oleh Sulaiman Labai tanpa diperintah atau minta izin kepada organisasi Sarekat Islam atasan (Cabang Padang Panjang).

Bagi orang Silungkang, seperti dikatakan Mestika Zed, Sarekat Rakyat masih terkait dengan Sarekat Islam Merah, atau Sarekat Islam secara umum, bukan dengan PKI. Bagi anggota Sarekat Rakyat Silungkang pada umumnya, yang penting adalah berjuang melawan penjajah Belanda, dan "tokoh-tokohnya adalah orang beragama dan menjalankan syariat Islam" (Zed 2004, 117). Semua anggota Sarekat Rakyat adalah alumni pendidikan surau, sedangkan para pemimpin mereka adalah lulusan pendidikan agama yang lebih tinggi, yaitu sekolah diniyah. Jenis pendidikan seperti itulah yang lazim diikuti oleh penduduk perdesaan Silungkang dan sekitarnya pada masa itu.

Salah seorang guru agama yang terkenal antipenjajahan di Silungkang adalah Pakih Yaakub. Ajaran beliau dalam menentang penjajahan diberikan dalam bentuk penekanan pada ayat-ayat tertentu dalam Al-Qur'an, antara lain ayat yang paling berkesan adalah Surat An-Nisa' ayat 75, yang berbunyi: "Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak yang berdoa 'Ya Tuhan kami, keluarkan kami dari negeri ini yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisiMu, dan berilah kami penolong dari sisiMu,'" dan potongan dari ayat dalam Surat Ar-Ra'd ayat 11, yang berbunyi: "Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri" (Raid 2002, 3).

Keadaan itu lebih mendesak daripada perdebatan tentang perbedaan ideologi. Cara menentang itu pulalah yang menarik minat rakyat Silungkang dan nagari sekitarnya untuk menjadi anggota Sarekat Rakyat. Pada tahun 1924, menurut Benda dan McVey (1960, 104), terdapat 660 orang anggota Sarekat Rakyat di seluruh Sumatera Barat, pada 1926, menurut pimpinan Sarekat Rakyat Silungkang, Mohammad Jusuf

Sampono Kayo, terdapat 1140 orang anggota Sarekat Rakyat di cabang Silungkang saja (Zed 2004, 117). Sebuah perkembangan yang luar biasa. Keadaan itu dapat dibandingkan dengan jumlah anggota PKI di Sumatera Barat yang hanya 10 orang sampai Februari 1925 (Benda & McVey 1960, 106). PKI Sumatera Barat tampaknya hanya sebagai kantor penghubung antara Sarekat Rakyat Sumatera Barat dan Kantor Pusat PKI di Jawa yang diurus oleh beberapa gelintir kader.

Tentang kedudukan Sarekat Rakyat di Silungkang, diceritakan oleh Nasution:

Sampai dengan tahun 1924 Sarekat Islam anak cabang Silungkang dilebur menjadi Sarekat Rakyat anak cabang Silungkang. Sebagian besar penduduk telah masuk dalam organisasi politik ini. Mulai tahun 1924 inilah penulis (Nasution, sic) menjadi anggota, yaitu dalam umur 18 tahun. (Nasution 1981, 48).

Keadaan itu diperkuat oleh pernyataan Zed:

Sampai ... tahun 1924, dan sebenarnya sampai tahun-tahun berikutnya, gerakan komunis di Sumatera Barat, khususnya yang berada di bawah kepemimpinan Padang Panjang, lebih suka bernaung di bawah Sarekat Rakyat ketimbang PKI. (Zed 2004, 61).

Karena itulah, ketika Partai Komunis Indonesia memutuskan, dalam Kongres di Kota Gede Yogyakarta Desember 1924, bahwa Sarekat Rakyat sudah masanya harus dilebur ke dalam Partai Komunis Indonesia, instruksinya tidak ditaati oleh Sarekat Rakyat Padang Panjang dan Silungkang, dan Sumatera Barat. Di Sumatera Barat, Sarekat Rakyat tetap hidup, bahkan jauh lebih populer dan lebih banyak anggotanya dibandingkan anggota PKI (Zed 2004, 61). Dengan demikian, dari sudut pandang resmi Partai Komunis Indonesia, Sarekat Rakyat sebenarnya bukan lagi bagian dari Partai Komunis Indonesia. Namun, keperluan akan dukungan massa melawan kapitalis membuat PKI membiarkan keadaan itu berlangsung terus.

Dalam Konferensi Padang Panjang Mei 1925, anggota Sarekat Rakyat dimasukkan sebagai anggota sementara (*provisional members*) PKI. Dengan cara demikian, di mata pemerintah kolonial, PKI adalah sebuah organisasi politik yang besar di Sumatera Barat. Sementara itu, demi keberhasilan perjuangan melawan penjajah Belanda, Sarekat Rakyat tetap memerlukan *ilmu kumunih* (*the intellectual leadership of the Communist*). Demikianlah simbiosis mutualistis antara Sarekat Rakyat dan PKI, antara Islam dan Komunis, terus berlangsung di Sumatera Barat pada umumnya dan di Silungkang khususnya, sampai meletus Perlawanan Rakyat Silungkang pada 1926–1927.

Di bawah ini diberikan gambaran mengenai perkembangan anggota Sarekat Rakyat di Sumatera Barat sampai 1924.

No.	Anak cabang (Lokasi)	Jumlah anggota
1	Kota Lawas	101
2	Solok	79
3	Payakumbuh	21
4	Sungei Sarik	110
5	Lubuk Basung	114
6	Silungkang	25
7	Fort van der Capellen	24
8	Fort de Kock	54
9	Muaro Labuh	24
10	Sawahlunto	49
11	Kacang (Solok)	25
12	Tikalas (Solok)	28
13	Anggota tersebar	6
	Jumlah	660

Tabel 2. Sebaran Anggota Sarekat Rakyat, Sumatera Barat (1924). (Sumber: Benda & McVey 1960, 104–105).

KOMUNISME DAN ISLAM

Mempelajari tulisan Schrieke (1955) dan laporan kolonial dalam Benda & McVey (1960), dapat disimpulkan bahwa pengaruh Partai Komunis Indonesia terhadap organisasi Sarekat Rakyat Silungkang yang menggerakkan perlawanan rakyat Silungkang 1926–1927 hanya sampai pada batas pemberi inspirasi, semangat, dan petunjuk-petunjuk dalam pengorganisasian gerakan, atau yang dalam bahasa lokal disebut *ilmu kuminih*, dan tentang penentuan hari pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Belanda pada akhir tahun 1926. PKI dan Sarekat Rakyat memang bersatu dalam gerakan revolusioner melawan Belanda, tetapi PKI tidak sampai menentukan pengambilan keputusan akhir: Apakah akan melakukan perlawanan atau tidak? Bila perlawanan itu akan dilakukan? Bagaimana susunan organisasi perlawanan? Siapa yang akan memimpin perlawanan? Dengan demikian, PKI jauh dari pelaksanaan lapangan. Dengan kata lain, bersetuju dengan para penulis lokal, dapat disimpulkan bahwa perlawanan rakyat Silungkang tidak berdasarkan ideologi komunis, tidak digerakkan oleh orang komunis, tidak dibiayai dan tidak dilaksanakan oleh Partai Komunis Indonesia, tetapi atas ideologi Islam revolusioner, digerakkan oleh organisasi Sarekat Rakyat, dan dilaksanakan atas kerja sama Sarekat Rakyat Silungkang, organisasi buruh tambang Sawahlunto, dan dua orang serdadu Belanda asal Manado. Karena itulah, saya lebih suka menyebut gerakan ini sebagai sebuah gerakan Islam revolusioner.

Untuk mendukung pendapat tersebut, di bawah ini diperlihatkan beberapa perbedaan penting antara Partai Komunis Indonesia yang berada di bawah koordinasi Komunis Internasional dan Sarekat Rakyat yang menggerakkan perlawanan Silungkang.

Kriteria	Partai Komunis Indonesia	Sarekat Rakyat Silungkang
Kaitan politik	Bagian dari Komunis Internasional. Mendukung gerakan kemerdekaan sebagai taktik perjuangan, bukan tujuan pokok perjuangan (Thesis Lenin 1920).	Mulanya adalah Anak Cabang Sarekat Islam. Lebur menjadi Sarekat Rakyat karena lebih revolusioner. Secara 'resmi' bergabung di bawah Partai Komunis Indonesia, tetapi bergerak secara otonom.
Tujuan perjuangan	Membebaskan kaum proletar dari penindasan kapitalis-burjuis sedunia.	Merdeka dari penindasan imperialis-kolonialis Belanda.
Protagonis	Proletar	Peisan dan burjuis setempat (Petani & Pedagang).
Kepercayaan	Atheis	Islam ortodoks
Basis perjuangan	Negara-negara industri Eropa, berpusat di Rusia setelah Revolusi 1917.	Indonesia (negara jajahan dan terbelakang).

Tabel 3. Perbandingan PKI dengan Sarekat Rakyat.

PADANG VERSUS PADANG PANJANG

Kini kita kembali sejenak pada Hadji Datuk Batuah dalam rangka melihat perkembangan PKI di Sumatera Barat, dan Sarekat Rakyat di Silungkang. November 1923 pimpinan Sarekat Rakyat Padang Panjang, Hadji Datuk Batuah dan Natar Zainuddin ditangkap Belanda, dan Januari 1925 dihukum buang ke Kalabahi dan Kafamananu (Timor). Dengan kepergian Hadji Datuk Batuah dan Natar Zainuddin, apa yang terjadi setelah itu dalam organisasi Sarekat Rakyat di Sumatera Barat?

Setelah itu, terjadi reorganisasi dalam pimpinan organisasi PKI dan Sarekat Rakyat di Sumatera Barat. Pimpinan PKI mulai berusaha untuk menertibkan keberadaan Sarekat Rakyat dalam lingkungan organisasi PKI. Konferensi PKI Padang Panjang Mei 1925 memutuskan PKI Padang sebagai wakil langsung Komite Sentral PKI Pusat, cabang-cabang selebihnya yang selama ini bergerak bebas atas nama Sarekat Rakyat diberi status anak cabang yang harus patuh di bawah instruksi Padang, dan seterusnya di bawah instruksi Komite Sentral PKI Pusat. Struktur yang seperti ini tidak disukai oleh sebagian besar anak-anak cabang yang cenderung kepada prinsip otonomi organisasi. Akibatnya, pimpinan organisasi PKI Sumatera Barat pada April 1926 kembali pindah berpusat di Padang Padang, dan pimpinan dialihkan kepada Arif Fadillah, seorang pengikut berat Tan Malaka (Zed 2004, 63).

Setelah kejadian tersebut, terjadi ketidakjelasan dalam laporan kolonial tentang PKI dan Sarekat Rakyat Sumatera Barat. Mengingat dominannya Sarekat Rakyat Cabang Padang Panjang dan anak-anak cabangnya dalam PKI Sumatera Barat, muncullah pertanyaan apakah Arif Fadillah adalah anggota Sarekat Rakyat yang menjadi anggota sementara (*provisional member*) PKI atau memang kader murni PKI? Dalam penelitian yang sederhana ini, saya belum dapat memberi jawaban yang pasti. Namun, saya cenderung memilih yang pertama. Bagaimanapun, dalam laporan resmi Belanda, Arif Fadillah tercatat sebagai Ketua PKI Sumatera Barat, dan lebih tunduk pada Tan Malaka daripada kepada Komite Sentral PKI Pusat. Bagi Belanda, ke mana pun afiliasinya, apabila dia dekat dan tunduk kepada Tan Malaka, berarti dia adalah anggota komunis.

Padahal kita mengetahui bahwa Tan Malaka mempunyai ciri-ciri tersendiri dalam pimpinan PKI, yaitu masih mempunyai ikatan kuat dengan ideologi nasionalisme Indonesia dan PanIslamisme serta menganjurkan taktik memperkuat Sarekat Rakyat di Sumatera Barat (Benda & McVey 1960, 139). Di sini sekali lagi saya kutip pendirian Tan Malaka yang mendukung penguatan Sarekat Rakyat: "*Our tactics vis-avis*

the nationalist and religion revolutionaries must be to attract them to Sarekat Rakyat" (Benda & McVey 1960, 139). Mungkin, kedua hal ini, yaitu nasionalisme Indonesia dan PanIslamisme, yang membuat Arif Fadillah lebih dekat kepada Tan Malaka daripada ke Komite Sentral PKI di Jawa. Sebagaimana diketahui, setelah pemberontakan PKI yang gagal pada 1926, Tan Malaka keluar dari PKI dan mendirikan Partai Republik Indonesia (PARI).

Membandingkan ideologi PKI Padang dengan ideologi PKI Padang Panjang, dapat dikatakan bahwa Padang lebih berorientasi ke komunisme bercorak kelslaman (PKI) atau sekuler. Sementara itu, Padang Panjang, menurut Zed, berorientasi ke Islam yang revolusioner (Sarekat Rakyat), tetapi keduanya bertemu dalam memandang penjajah Belanda sebagai musuh bersama (Zed 2004, 63–64). Komunis melihat Belanda sebagai kapitalis, sedangkan Islam melihat Belanda sebagai penjajah kafir. Perbedaan ideologi PKI Padang dengan PKI/Sarekat Rakyat Padang Panjang ini terjadi karena kuatnya pengaruh Sekolah Islam Thawalib Padang Panjang dalam organisasi PKI/Sarekat Rakyat Padang Panjang. Setelah itu, PKI Sumatera Barat beserta anak-anak cabangnya yang Sarekat Rakyat itu diusahakan untuk lebih berorientasi ke Komite Sentral PKI Pusat secara ideologis dan organisatoris, melalui instruksi dan bantuan dana dari Pusat meskipun tidak sepenuhnya berhasil, termasuk terhadap Sarekat Rakyat Silungkang.

STRATEGI DAN TAKTIK SAREKAT RAKYAT

Seperti telah diuraikan di muka, Sarekat Rakyat Silungkang adalah organisasi Islam revolusioner yang taktik dan strategi dasarnya melawan pemerintah kolonial Belanda dipandu dengan cara-cara yang diajarkan oleh PKI. Berikut ini beberapa cara yang mereka lakukan dalam gerakan revolusioner itu. Pertama, menjalin kerja sama dengan kekuatan revolusioner lain di Sawahlunto, yaitu Perserikatan Kaum Buruh Tambang (PKBT) Sawahlunto (Zed 2004, 118–119; Nasution 1981, 59). Ternyata secara diam-diam mereka juga menjalin hubungan rahasia dengan perwira rendah tentara Belanda yang berjiwa revolusioner di Sawahlunto, yaitu Sersan Mayor Pontoh dan Sersan Rumuat.

Kedua, menerbitkan media massa untuk menyalurkan pandangan politis mereka tentang kolonial Belanda, yaitu koran bulanan *Panas* oleh Sarekat Rakyat dan koran *Soeara Tambang* oleh PKBT. Kedua koran itu berkantor di sebuah ruangan yang sama dengan organisasi Sarekat Rakyat dan PKBT di Sawahlunto. Kedua koran itu tesebar luas di segenap nagari sekeliling Silungkang dan Sawahlunto. Dikatakan oleh Muluk Nasution, Ketua Redaksinya, bahwa *Soeara Tambang* terbit dengan tiras 10 000 exemplar pada bulan-bulan pertama pada 1926 (Nasution 1981, 61). Dalam pada itu, di Silungkang, kantor Sarekat Rakyat berpindah dari satu rumah ke rumah lain dalam rangka menghindari dari kejaran polisi Belanda. Baik di Sawahlunto maupun di Silungkang tidak ada pengurus dan kantor PKI. Sarekat Rakyat bergerak secara otonom di bawah pimpinan setempat.

Ketiga, membangun jaringan sel dalam struktur organisasi Sarekat Rakyat. Ada kelompok *nan sapuluh* dan ada pula kelompok *nan limo*. Dengan kelompok-kelompok kecil ini, organisasi dapat bergerak lebih lincah dan tersembunyi. Dengan demikian, terwujudlah prinsip sentralisme demokratik (Benda & McVey 1960, 107). Keempat, Sekretaris Sarekat Rakyat Silungkang, yaitu Datuk Sinaro Chatib, membangun perpustakaan kecil di rumahnya di Silungkang untuk mencerdaskan rakyat, dengan koleksi sekitar 1000 buku yang kebanyakan buku terjemahan karangan penulis Eropah dan Tiongkok (Nasution 1981, 49). Kelima, menyelenggarakan kursus lima menit untuk para anggota untuk memberi pengetahuan dasar tentang gerakan revolusioner melawan Belanda dan saling berbagi informasi.

Terakhir, propaganda dan agitasi yang dilancarkan dalam khotbah Jum'at, majelis taklim, dan pengajian. Karena propaganda dijalankan dalam institusi Islami oleh para kiyai dan guru agama, isinya adalah tafsir

atas ayat-ayat Al-qur'an dan al-hadits yang mengajak umat Islam untuk berjihad melawan penjajah Belanda yang kafir. Tokoh yang terkenal dalam propaganda dan agitasi itu ialah Pakih A'in (Pakih Berahim) dari Padang Sibusuk, lulusan Pesantren Parabek (Zed 2004, 120; Nasution 1981, 73). Apa yang terjadi di sini adalah strategi dan taktik komunis yang dijalankan secara Islami oleh organisasi lokal Sarekat Rakyat.

RENCANA HARI PENYERANGAN SAWAHLUNTO

Gerakan revolusioner Sarekat Rakyat yang oleh PKI diakui sebagai *onderbouw* tidak resmi dari PKI, di Sumatera Barat pada umumnya dan di Silungkang khususnya, berorientasi pada kebijakan dan strategi yang diinstruksikan oleh Komite Sentral PKI di Jawa. Faktor itulah yang terutama digunakan pemerintah kolonial untuk menuduh gerakan Sarekat Rakyat Silungkang sebagai bagian dari gerakan revolusioner PKI di Hindia Belanda, bahkan terus ke Moskow sebagai pusat pemegang inisiatif dan pemikiran tentang gerakan revolusioner kaum proletar sedunia. Pemikiran tentang gerakan revolusi untuk merubuhkan pemerintah penjajah Belanda, sebagai bagian dari revolusi proletar untuk menghancurkan kapitalisme dunia, telah diputuskan dalam pertemuan rahasia pimpinan PKI di Prambanan (Solo) Desember 1925. Dalam pertemuan tersebut, PKI Cabang Sumatera Barat diwakili oleh Sutan Said Ali. Dalam pertemuan itu diputuskan: "*Kita sekarang akan menggunakan seluruh kekuatan dan energi kita untuk mempersiapkan Revolusi yang tidak tertahan pada bulan Juli 1926*" (Benda & McVey 1960, 116)

Keputusan itu dilaporkan oleh Sutan Said Ali kepada Idrus, pimpinan PKI Solok, untuk diteruskan kepada Sarekat Rakyat di Sawahlunto dan Silungkang. Berita yang dibawa Sutan Said Ali menimbulkan kontroversi dalam kalangan Sarekat Rakyat di Sawahlunto dan Silungkang. Instruksi itu kurang lengkap dan kurang jelas, terutama untuk Sarekat Rakyat Sawahlunto dan Silungkang. Pertama, berkaitan dengan hubungan organisatoris antara Komite Sentral PKI di Jawa dan Sarekat Rakyat Silungkang yang tidak jelas garis formalnya. Kedua, berkenaan dengan analisis situasi politis-ekonomis-sosial Indonesia yang menjadi dasar instruksi itu. Banyak yang berpendapat bahwa instruksi itu dikeluarkan tanpa analisis yang tajam tentang kondisi politik-ekonomi-sosial dan kultural Indonesia, yaitu bahwa rakyat revolusioner Indonesia belum siap untuk melakukan gerakan pemberontakan itu. Keputusan dibuat secara tergesa-gesa. Pemimpin Komintern Tan Malaka termasuk yang tidak menyetujui instruksi itu.

Instruksi Prambanan tersebut membawa dampak pada Pemerintah Kolonial Belanda, yang segera siap siaga untuk mencegahnya. Sebaliknya, Sarekat Rakyat Silungkang siap untuk melaksanakan instruksi itu. Di pihak Belanda, muncul tindakan-tindakan sebagai usaha pencegahan gerakan revolusi itu. Diberlakukan *pers breidel ordonantie* oleh pemerintah kolonial sejak 1 April 1926 yang menyatakan bahwa setiap media massa harus melaporkan isi terbitannya satu hari sebelum hari penerbitan (Nasution 1981, 68). Stasiun-stasiun kereta api mulai dijaga oleh beberapa *vieldpolitie*. Sebaliknya, Sarekat Rakyat Cabang Padang Panjang mengeluarkan surat instruksi kepada semua anak cabang agar bersiap-siap menghadapi razia dan penangkapan massal yang akan dilancarkan pemerintah kolonial terhadap para pemimpin Sarekat Rakyat. Instruksi serupa juga diteruskan kepada para pemimpin Perserikatan Kaum Buruh Tambang (PKBT) Sawahlunto (Nasution 1981, 70). Polisi Belanda melakukan penggerebekan kantor bersama koran *Panas*, koran *Soeara Tambang*, milik organisasi Sarekat Islam dan PKBT Sawahlunto. Polisi Belanda menyita semua dokumen dan terbitan yang ada dalam kantor itu. Semua tindakan itu terjadi dalam bulan April 1926 (Nasution 1981, 72).

Sarekat Rakyat Silungkang, sebaliknya, segera menyelenggarakan rapat mendadak di Nagari Padang Sibusuk pada April 1926 untuk menentukan sikap. Rapat itu dihadiri oleh 20–30 orang anggota Sarekat Rakyat Silungkang dan nagari-nagari sekitarnya. Dari Nagari Silungkang datang tiga orang kader, yaitu

Muchtar (Kutai), Toyib Ongah, dan H. Jalaludin. Rapat dipimpin oleh Muchtar (Kutai) yang berjalan dengan panas, dan dengan suara terbanyak memutuskan untuk membentuk Barisan Berani Mati, atau nama lain Sarekat Hitam, yang akan melaksanakan gerakan revolusi itu. Lagi-lagi di sini, Sarekat Rakyat Silungkang mengambil inisiatif sendiri dengan tidak menghiraukan hierarki partai atau organisasi, tanpa berkonsultasi dan minta izin kepada Cabang Padang Panjang. Ketika keputusan rapat di Padang Sibusuk ini dimintakan pengesahannya kepada organisasi yang lebih tinggi, ternyata PKI/Sarekat Rakyat Cabang Padang Panjang menolaknya.

Mengenai situasi yang rumit tersebut, banyak pihak menunggu kebijakan yang akan diambil pemimpin Sarekat Rakyat Silungkang, Sulaiman Labai, untuk menyelesaikan masalah ini. Muchtar (Kutai) yang memimpin rapat di Padang Sibusuk adalah utusan resmi Sarekat Rakyat Silungkang, mewakili Sulaiman Labai yang tidak sempat hadir (Sirin, 2002). Namun, apa hendak dikata, beberapa hari setelah itu, yaitu pada awal Mei 1926, pimpinan teras Sarekat Rakyat Silungkang, yaitu Sulaiman Labai dan Yusuf Rajo Kocik ditangkap polisi Belanda, ditahan dalam penjara Sawahlunto (Nasution 1981, 91). Jabatan Ketua Sarekat Rakyat Silungkang diserahkan kepada Talaha Rajo Sampono, dan kemudian dialihkan kepada Toyib Ongah (Nasution 19981, 91). Setelah Sulaiman Labai tertangkap, Sarekat Rakyat Silungkang dipimpin oleh kader-kader muda yang lebih keras dan bersemangat.

Meskipun tidak dibenarkan oleh Cabang Padang Panjang, Sarekat Rakyat Silungkang tidak menghiraukan, terus bertindak sendiri, bergerak di bawah tanah dengan nama Sarekat Hitam, yang menggiatkan kursus lima menit di seluruh wilayah, menghimpun makin banyak anggota di semua pelosok kampung, menghimpun dana dari para simpatisan, dan menyiapkan persenjataan untuk melaksanakan revolusi rakyat melawan Belanda (Nasution 1981, 82). Mereka bergerak secara rahasia, seorang anggota hanya mengenal seorang anggota lain yang menjadi penghubungnya. Senjata yang dapat mereka siapkan antara lain 200 buah granat tangan buatan sendiri yang mereka sebut *kuweh lempet*, ratusan kelewang (*rudus*), satu peti pistol *colt* kecil, yang mereka sebut *pisau ubi*. Senjata yang terakhir itu mereka beli dari sebuah toko orang Jerman yang menjual barang selundupan di kota Padang (Nasution 1981, 86–88). Dana untuk persiapan senjata dan menjalankan gerakan di bawah tanah itu diperoleh dari sumbangan orang kaya yang menjadi simpatisan perjuangan Sarekat Rakyat Silungkang.

Di pihak lain, polisi Belanda makin menggiatkan razia dan menangkap mereka yang dicurigai sebagai anggota Sarekat Rakyat. Ketua Sarekat Rakyat Sawahlunto, Haji Baharuddin, ditangkap Belanda pada Oktober 1926. Diceritakan oleh Nasution (1981, 86):

Suasana semakin panas. Banyak isteri dan ibu dari buronan polisi di Silungkang dan lain-lain tempat telah ditangkap dan ditahan di kantor polisi sebagai sandera agar suami atau anaknya menyerah. Penahanan cara Belanda ini menimbulkan kemarahan rakyat... dua orang reserse dan seorang polisi yang berani masuk kampung, dibunuh oleh Sarekat Hitam... setiap hari ada militer KNIL atau veld-polisi berpatroli ke kampung-kampung menakut-nakuti penduduk...

EMOSI YANG TIDAK TERKONTROL

Pada 5 November 1926 pukul 12.30, sebuah telegram diterima oleh seorang pemimpin Sarekat Rakyat Silungkang dari Betawi. Telegram itu berbunyi "Rajobandaro Silungkang, kirim duabelas kodi kain sarung! Abdullah". Arti isi telegram itu 'Central Komite Pemberontakan di Betawi menginstruksikan bahwa pemberontakan dimulai pada 12 November 1926'. *Duabelas kodi* = 12 November. *Abdullah* = nama samaran pengirim telegram. Sementara itu, seorang pemimpin Sarekat Rakyat Silungkang, Talaha Rajo Sampono yang sebelumnya dikirim organisasi ke Jakarta untuk menemui Sentral Komite Pemberontakan telah

kembali ke kampung pada 9 November 1926. Talaha memberi kabar bahwa Central Komite Pemberontakan yang dipimpin oleh Sukrawinata, Baharuddin, Mahmud, dan Bakar Dahlan telah memutuskan bahwa pemberontakan dimulai 12 November 1926 dan dilaksanakan oleh cabang Betawi, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Makassar, Palembang, Lampung, Bengkulu, dan Sumatera Barat. Tampaknya terdapat perselisihan pendapat antara Central Komite Pemberontakan di Jawa dan pimpinan PKI/Sarekat Rakyat Padang Panjang yang melarang untuk ambil bagian dalam pemberontakan itu (Nasution 1981, 92).

Pada 11 November 1926 Sarekat Rakyat Silungkang menyelenggarakan rapat di rumah Talaha Sutan Langit. Rapat dihadiri oleh pimpinan Sarekat Rakyat Silungkang, antara lain Toyib Ongah, Alimin, Talaha Rajo Sampono, Maali, Sersan Rumuat. Sersan Rumuat adalah seorang anggota militer Belanda di Sawahlunto yang sudah dipecat pada bulan 1926 karena menghasut polisi dan tentara Belanda melawan pemerintah jajahan (Nasution 1981, 92).⁵ Kehadiran Sersan Rumuat dapat diartikan bahwa gerakan pemberontakan juga telah melibatkan unsur polisi dan tentara Belanda yang ada di Sawahlunto. Dalam rapat itu, Sersan Rumuat menyatakan bahwa *vel'd* polisi Sawahlunto siap sedia berperan dalam pemberontakan. Meskipun pimpinan PKI/Sarekat Rakyat Cabang Panjang di bawah pimpinan Arif Fadilah tidak menyetujui gerakan pemberontakan itu, seorang pimpinan Sarekat Rakyat Silungkang, Alimin, mengusulkan agar Silungkang maju terus. Namun, usul itu diragukan oleh Talaha Rajo Sampono yang khawatir bahwa gerakan itu tidak diikuti oleh cabang lain. Demikianlah, suasana ketidakpastian terus menyelimuti rencana pemberontakan. Di satu pihak, Sarekat Rakyat Silungkang sudah siap untuk memulai gerakan, di pihak lain, restu dan instruksi dari organisasi atas, yaitu Cabang Padang Panjang, tidak kunjung pasti.

Menjelang akhir Desember 1926, seorang pemimpin Cabang PKI Sumatera Barat, Harun, kembali dari Jawa, mengabarkan perubahan bahwa revolusi akan dimulai serentak pada 1 Januari 1927. Untuk meyakinkan berita itu, Sarekat Rakyat Silungkang mengirim Haji Jalaluddin dan Alimin ke Padang Panjang untuk menemui pimpinan Cabang, Arif Fadilah. Ternyata Arif Fadilah tidak dapat ditemui (Kemudian diketahui Arif Fadilah telah ditangkap secara diam-diam oleh Belanda dan ditahan di Sawahlunto) (Nasution 1981, 94). Sementara itu, diperoleh kabar bahwa di beberapa tempat di Jawa, yaitu di Betawi dan Banten, pemberontakan telah dimulai pada 12 November 1926. Pemberontakan di Betawi dapat ditindas oleh Belanda, sedangkan yang di Banten masih berlangsung.

Pada 21 Desember 1926 seluruh pimpinan cabang dan anak cabang Sarekat Rakyat Silungkang, Sawahlunto, Batu Sangkar, Padang Sibusuk, Tanjung Ampalu, Sijunjung, Siaro-aro, Pianggu, dan lain-lain berhimpun di Ngalau Surek (Silungkang) untuk menentukan keputusan akhir. Rapat ini dipimpin oleh Ketua Sarekat Rakyat Silungkang, Toyib Ongah, dan dihadiri oleh sekitar 30 orang peserta. Dalam rapat itu, Haji Jalaluddin dan Alimin yang baru kembali dari Padang Panjang untuk menemui Arif Fadilah (tetapi tidak bertemu dengan Arif Fadillah), membawa berita bahwa:

- (1) pemberontakan yang telah dikobarkan di Jawa, yaitu di Betawi, Banten, Solo, Boyolali dan lain-lain gagal. Organisasi PKI/Sarekat Rakyat dibubarkan oleh pemerintah kolonial Belanda dan
- (2) berdasarkan keadaan tersebut, konferensi darurat PKI/Sarekat Rakyat di Koto Laweh memutuskan untuk tidak melanjutkan gerakan pemberontakan oleh Cabang dan Anak Cabang yang mana pun di Sumatera Barat (Sirin 2002; Nasution 1981, 95).

Sarekat Rakyat Silungkang kembali berada dalam kebingungan. Perang atau tidak perang. Padahal segala sesuatu telah disiapkan dengan bersemangat dan lengkap, termasuk kerja sama dengan Sersan

⁵ Pada November 1926 itu, seorang lagi pemimpin Sarekat Rakyat Silungkang, Datuk Bagindo Ratu, ditangkap Belanda.

Rumuat dan Sersan Mayor Pontoh beserta anak buah mereka, dan dengan Perserikatan Kaum Buruh Tambang (PKBT) Sawahlunto di bawah pimpinan Kasan Wijoyo. Dalam keadaan seperti itulah muncul seorang pemuda penaik darah, Kamaruddin alias Manggulong. Begitu rapat dibuka, selesai pimpinan rapat memberi penjelasan tentang situasi yang dihadapi oleh organisasi, Kamaruddin Manggulong langsung interupsi dengan suara keras sambil mengacungkan sebuah revolver di tangan kanannya:

Saudara-saudara! Pemberontakan harus dan wajib kita adakan. Kita lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Lebih baik mati di pertandingan daripada mati di pembaringan. Saya minta kata putus, satu antara dua, siapa-siapa di antara Saudara-saudara yang tidak setuju diadakan pemberontakan agar menunjuk tangan dan keluarlah dari sidang ini! (Nasution 1981, 96).⁶

Tidak ada tangan yang teracung. Semua peserta rapat nampak setuju bahwa pemberontakan dilaksanakan pada 1 Januari 1927. Meskipun demikian, semua masih dalam keadaan bimbang, takut kalau gerakan pemberontakan ini akan gagal seperti yang terjadi di berbagai tempat di Jawa. Mereka belum pernah melakukan hal ini. Pekerjaan sehari-hari mereka adalah bertani dan berniaga. Namun, keputusan sudah dibuat. Tidak ada jalan mundur lagi. Maka, dibentuklah Komite Pemberontakan secara terburu-buru dengan Toyib Ongah sebagai Ketua, Alimin sebagai Sekretaris, M. Jusuf Sampono Kayo dan Talaha Rajo Sampono sebagai Bendahara/ Perbekalan, H. Jalaluddin sebagai Komisaris, dan Sersan Rumuat dan Sersan Mayor Pontoh sebagai Komandan Barisan dan Strategi (pengatur perlawanan). Kaum pemberontak tampaknya banyak menaruh harapan pada dua tentara Belanda ini karena merekalah yang ahli dalam berperang. Semua direncanakan secara rahasia.

RENCANA PENYERANGAN YANG KURANG MATANG

Setelah itu, dibentuk Barisan Perang yang akan melaksanakan pemberontakan untuk menyerang pusat pemerintahan kolonial Belanda di Sawahlunto. Seluruh Barisan Perang dibagi dalam tiga barisan, yaitu 1) Barisan Inti, 2) Barisan Cadangan, dan 3) Barisan Khusus. Barisan Inti terdiri atas 27 anggota militer garnizon Sawahlunto yang dipimpin oleh Sersan Mayor Pontoh dibantu oleh Sersan Rumuat. Barisan Inti bertugas menyerang:

- (1) kantor-kantor pemerintah kolonial Belanda di Sawahlunto dan membunuh para pegawainya;
- (2) gedung klub *Societeit* yang ramai dikunjungi pegawai-pegawai Belanda pada malam minggu;
- (3) perusahaan tambang batu bara dan membunuh para pegawai-pegawai tingginya; dan
- (4) penjara Sawahlunto dan melepaskan para tahanan (Zed 2004, 126).

Barisan cadangan terdiri atas lima kelompok. Kelompok pertama adalah barisan Sarekat Rakyat Tanjung Ampalu/Padang Sibusuk yang dipimpin oleh Munaf dan Mohammad Zen, yang akan menyerbu Sawahlunto melalui jalan Air Dingin. Kelompok kedua adalah barisan Sarekat Rakyat Silungkang/Pianggu dipimpin oleh Latif dan Wahid, yang akan memasuki Sawahlunto melalui jalan Kubang. Kelompok ketiga

⁶ Zed mempunyai versi lain tentang kejadian ini. Pertama menurut Zed, Kamaruddin Manggulong mengucapkan pidato tersebut dalam rapat terakhir tanggal 31 Desember 1926 malam di 'rumah tinggi'. Kedua, Alimin masih berada di Padang Panjang menemui Arif Fadillah sampai saat terakhir pasukan akan bergerak menuju Sawahlunto. Saya lebih menyetujui keterangan dari Nasution, karena, pertama, Nasution ikut terlibat dalam rapat di Ngala Surek tersebut. Kedua, keterangan Nasution diperkuat oleh tulisan Anwar Sirin (Sirin 2002).

adalah barisan Sarekat Rakyat Tarung-tarung/Siaro-aro/Taratak Bancah di bawah pimpinan Abdul Muluk, yang akan masuk ke Sawahlunto melalui jalan raya Kubang Sirakuk. Kelompok keempat adalah barisan Sarekat Rakyat Muaro Kalaban di bawah pimpinan Karim Marokko dan Muluk Caniago, yang akan masuk ke Sawahlunto melalui terowongan kereta api. Terakhir adalah kelompok Sawahlunto sendiri yang terdiri atas anggota-anggota Sarekat Rakyat yang dipimpin oleh Rajo Bujang dan organisasi buruh tambang yang dipimpin oleh Kasan Wijoyo (Nasution 1981, 98–99).

Sementara itu, Barisan Khusus atau Barisan Pengawal yang bertugas mengawal/keamanan, terdiri atas anggota Sarekat Hitam (*Dood organisatie*) yang dipimpin oleh Kamaruddin Manggulung, Jusuf Sampono Kayo, Berahim, dan para pendekar silat yang lain. Tugas mereka adalah membunuh orang-orang penting di Nagari Silungkang yang pro atau mendukung Belanda dan merusak fasilitas telekomunikasi dan perhubungan yang menghubungkan Silungkang dengan dunia luar.

KELEMAHAN IPTEK DAN ORGANISASI

Sabtu petang 31 Desember 1926, pasar Silungkang mulai ramai didatangi pengunjung. Pusat keramaian adalah di *rumah tinggi* bertingkat dua yang terletak di pangkal *titi* (jembatan) menghadap ke pasar, yaitu lepau nasi milik M. Jusuf Sampono Kayo, seorang kaya Silungkang yang juga memiliki tiga mobil tambangan. Para pengunjung datang dari berbagai kampung di Silungkang dan dari jorong-jorong dan nagari-nagari sekitar Silungkang, antara lain Muaro Kalaban, Pianggu, Sungai Tjotjang, Sungai Luo, Siaro-aro, Tarung-tarung, dan lain-lain. Sejak beberapa hari sebelumnya telah beredar kabar dari mulut ke mulut: “*Datanglah ke Silungkang! Muhammad Jusuf di rumah tinggi telah memotong kerbau...*” untuk merayakan perkawinan anak gadisnya (Zed 2004, 123; Nasution 1981, 97). Demikianlah cara organisasi Sarekat Rakyat Silungkang dalam menghimpun anggota untuk memulakan gerakan pemberontakan melawan kekuasaan Belanda di Sawahlunto.

Setiap jalan keluar masuk Silungkang telah dijaga oleh pasukan yang bersenjata rudus, bahkan satu dua ada yang memakai pistol. Setiap pengunjung diizinkan masuk, tetapi tidak bisa keluar. Diceritakan oleh salah seorang pelaku, A. Muluk Nasution (1981, 97):

Saya sampai di pekan Silungkang pada pukul 8 malam beserta lebih kurang 180 orang (barisan dari Tarung-tarung dan Siaro-aro) dikepalai oleh Rahman, Baharuddin dan Mohammad Tahir. Kami empat orang melapor kepada Pimpinan di tingkat atas, sedang anak-anak barisan berkumpul di los pekan yang telah penuh oleh barisan-barisan yang berdatangan dari kampung-kampung lain.... di tingkat atas, yang ternyata telah penuh sesak pula dengan Kepala-kepala Barisan dari kampung-kampung Silungkang dan sekitarnya.

Tepat pukul 22.00 barisan-barisan yang menuju Sawahlunto melalui jalan darat Muara Kalaban telah berangkat dari markas Silungkang. Satu kilometer sebelum Muara Kalaban barisan ini duduk menunggu anggota barisan lain. Jumlah anggota mencapai sekitar 300 orang. Setelah itu, barisan meneruskan perjalanan ke Sawahlunto dengan meliwati pos polisi Muara Kalaban. Mereka tidak menggubris pos polisi itu karena penyerangan terhadap pos polisi itu bukan tugas mereka, tetapi tugas barisan yang di bawah pimpinan Karim Marokko yang akan dilaksanakan bersamaan dengan penyerangan terhadap Sawahlunto pada pukul 24.00. Ternyata, rencana itu adalah sebuah kesalahan serius. Sementara sebagian besar anggota barisan terus berjalan menuju Sawahlunto, beberapa anggota yang berjalan di belakang dipanggil dan diinterogasi oleh polisi Muara Kalaban. Interogasi ini berakhir dengan perkelahian dengan menggunakan senjata api dan

bom di dalam kantor polisi yang menewaskan dua anggota barisan. Kejadian itu dilaporkan oleh pos polisi Muara Kalaban ke Sawahlunto.

Pada pukul 23.15, di sebuah tempat dekat turunan Sawahlunto, barisan yang berjalan di depan terserempak dengan sebuah mobil sedan yang datang dari arah Sawahlunto. Mobil itu ternyata berisi beberapa orang pemimpin Sarekat Rakyat Sawahlunto, antara lain Marzuki dan Thayyib Yahya. Marzuki melaporkan bahwa rencana penyerbuan Sawahlunto telah diketahui Belanda. Sersan Mayor Pontoh dan Sersan Rumuat beserta 20 anggota militer Pribumi di bawahnya telah ditangkap Belanda dua malam yang lalu. Malangnya, berita tentang penangkapan itu tidak sampai ke Silungkang dan baru diterima dari Ketua Sarekat Rakyat Sawahlunto, Rajo Bujang, pukul 22.00 malam itu (Zed 2004, 133; Nasution 1981, 102). Demikianlah, penyerbuan ke Sawahlunto gagal dan para pemberontak yang tidak sempat melarikan diri ditangkap oleh Belanda. Meskipun perlawanan masih berlangsung selama beberapa hari kemudian di daerah-daerah, secara keseluruhan gerakan revolusi ini tidak mencapai tujuannya. Kegagalan revolusi ini terjadi karena kelemahan dalam pengaturan tugas kelompok pemberontak, kelemahan dalam teknologi dan jaringan informasi, dan tidak mempunyai tenaga ahli intelegen. Mereka semua adalah rakyat kebanyakan yang selama ini bekerja sebagai petani dan pedagang. Yang mereka punyai hanyalah semangat juang *fi sabilillah*.

KESIMPULAN

Dalam bagian terakhir ini dijawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam bagian terdahulu dan satu pertanyaan yang diajukan oleh Anwar Sirin. Pertanyaan pertama: siapakah yang melaksanakan perlawanan, PKI atau Sarekat Rakyat? Dari uraian terdahulu cukup jelas tergambar bahwa perlawanan rakyat Silungkang tidak berdasarkan ideologi komunis, tidak digerakkan oleh orang komunis, tidak dibiayai dan tidak dilaksanakan oleh Partai Komunis Indonesia, tetapi berdasarkan ideologi Islam revolusioner, digerakkan oleh organisasi Sarekat Rakyat, dan dilaksanakan dalam kerja sama Sarekat Rakyat Silungkang, Perserikatan Kaum Buruh Tambang (PKBT) Sawahlunto, dan dua orang serdadu Belanda asal Manado. Oleh karena itu, saya menamakan Pemberontakan Silungkang sebuah Gerakan Islam Revolusioner, yaitu gerakan revolusi menggulingkan pemerintahan kolonial Belanda di Sawahlunto dengan semangat jihad *fi sabilillah* yang dikampanyekan oleh Pakieh A'in dalam setiap khotbah Jumat, majelis taklim, dan oleh guru agama Pakieh Yaakub. Bagaimanapun, gerakan perlawanan ini mendapat pengaruh PKI. Akan tetapi, pengaruh PKI itu hanya sampai pada batas pemberi inspirasi, semangat dan petunjuk dalam pengaturan organisasi gerakan, atau yang dalam bahasa lokal disebut *ilmu kuminih* (atau *intellectual leadership of the Communist*), dan terakhir adalah dalam hal penentuan hari pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Belanda pada akhir 1926.

Jika kemudian pemerintah kolonial Belanda membesar-besarkan gerakan perlawanan ini sebagai gerakan komunis, usahanya mungkin terjadi karena *Hermes dilemma* (Crapanzano 1986, 51–76). Laporan-laporan kolonial tentang peristiwa itu dibuat dengan sikap asal bapak senang dan kacamata kolonial oleh para pegawai rendahan kolonial. Kemungkinan lain adalah pendapat Antlöv dan Cederoth yang mengatakan, “Para petugas kolonial Belanda pada umumnya tidak mengetahui kondisi perdesaan, dan hanya memperhatikan pemimpin desa jika mereka itu dianggap sebagai ancaman bagi kekuasaan Belanda. Oleh karena itu, hanya sedikit yang diketahui tentang kondisi yang sebenarnya dari kepemimpinan di perdesaan selama masa kolonial” (Antlöv dan Cederoth 2001, 2). Karena itulah, dalam kesempatan ini saya mengulangi lagi betapa pentingnya sumber *oral history* dalam kajian sejarah kontemporer.

Pertanyaan kedua, mengapa gerakan perlawanan tersebut dipimpin oleh tokoh-tokoh dari Nagari Silungkang, tidak dari nagari-nagari lain, di sekitarnya. Pertanyaan itu terjawab dalam bagian Kepeloporan Masyarakat Silungkang. Nagari mempunyai banyak kader *entrepreneur* yang berwawasan luas merupakan hasil dari pengalaman sebagai industriawan, peniaga, dan perantau. Nagari itu terletak di lintasan jalan darat dan jalan kereta api dari Sawahlunto ke Padang. Masyarakatnya kritis, berani, dan mempunyai pengalaman yang berhubungan dengan pemerintah kolonial Belanda di Sawahlunto. Dalam hal ini, saya telah melakukan satu pendekatan etnohistoris dalam kajian. Saya mengombinasikan metode sejarah dan metode etnografi.

Pertanyaan ketiga adalah tentang jalinan hubungan antara tiga pihak yang menggerakkan perlawanan tersebut yaitu Sarekat Rakyat Silungkang dan nagari-nagari sekitarnya, Perserikatan Kaum Buruh Tambang (PKBT) Sawahlunto, dan dua orang serdadu Belanda asal Manado yaitu Sersan Mayor Pontoh dan Sersan Rumuat. Hubungan antara semua pihak ini memang sudah lama terjalin sebagai kawan yang sama-sama revolusioner. Setiap organisasi menerbitkan koran (*Panas* dan *Soeara Tambang*) yang berkantor di tempat yang sama, yaitu di kantor pusat kedua organisasi itu di Sawahlunto. Hal ini diuraikan dalam bagian Kebangkitan Nasionalisme Indonesia di Silungkang. Sementara itu, informasi tentang awal hubungan antara kedua organisasi dan Sersan Mayor Pontoh dan Sersan Rumuat belum jelas. Dengan demikian, pemberontakan ini dapat digolongkan sebagai pemberontakan nasional Indonesia, bukan pemberontakan eksklusif suku Minangkabau, apalagi Silungkang, karena melibatkan kombinasi unsur lokal dan unsur nasional.

Pertanyaan keempat adalah tentang pengaturan organisasi perlawanan. Jawaban telah diuraikan secara panjang lebar dalam bagian Strategi dan Taktik Sarekat Rakyat. Di sini jelas terlihat bahwa peran utama dalam perlawanan ini, termasuk pendanaannya, dipegang oleh Sarekat Rakyat Silungkang yang dibantu oleh Perserikatan Kaum Buruh Tambang (PKBT) Sawahlunto di bawah pimpinan Kasan Wijoyo dan dua orang serdadu Belanda asal Manado Sersan Mayor Pontoh dan Sersan Rumuat. Peranan PKI/Sarekat Rakyat Sumatera Barat, termasuk Cabang Padang Panjang, sama sekali tidak ada karena mereka tidak menyetujui gerakan perlawanan ini. Sementara itu Komite Sentral PKI di Jawa adalah berperan sebagai koordinator dalam menentukan hari perlawanan (*D Day*) agar serentak dengan perlawanan yang dilakukan oleh cabang-cabang PKI lainnya di Jawa.

Pertanyaan ke lima, mengapa perlawanan ini terus dilakukan, sedangkan mereka mengetahui bahwa pemberontakan PKI di tempat lain di Jawa telah gagal, dan gerakan perlawanan ini juga tidak disetujui oleh cabang pada tingkat yang lebih tinggi di Padang Panjang? Ada dua jawaban untuk pertanyaan ini. Keduanya merujuk kepada karakter tokoh-tokoh Sarekat Rakyat Silungkang. Anwar Sirin mengatakan bahwa motifnya adalah penderitaan dan penghinaan yang tidak tertanggung lagi yang diderakan oleh penjajah Belanda kepada masyarakat Silungkang (Sirin 2002). Sementara itu, Nasution merujuk kepada karakter orang Silungkang yang emosional atau temperamental. Sifat itu tampak ketika Kamaruddin Manggulong menginterupsi Rapat Sarekat Rakyat 21 Desember 1926 di Ngalau Surek (Silungkang). Sambil mengancam dan mengacung-acungkan pistol di tangan kanan, dia berkata dengan lantang, "Pemberontakan harus dan wajib kita laksanakan" (Nasution 1981, 96).

Berdasarkan informasi samar-samar yang saya peroleh, saya menduga bahwa pada masa awal, saat tambang batu bara dibuka di Sawahlunto, kelompok masyarakat Belanda di Sawahlunto, terutama insinyur-insinyur mudanya telah melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan nagari di sekitar Sawahlunto secara teratur dan terkawal di bawah perlindungan militer dan polisi kolonial. Namun, informasi itu tidak pernah keluar dalam pembicaraan sehari-hari masyarakat lokal karena mengandung aib besar. Informasi itu pernah saya perbincangkan dengan seorang ahli peneliti LIPI, Dr. Erwiza Erman yang pernah meneliti

masyarakat pertambangan Sawahlunto zaman kolonial. Dengan demikian, terdapat berbagai faktor yang melatarbelakangi perlawanan rakyat itu, termasuk latar belakang psikologis dan kultural.

Pertanyaan keenam adalah tentang motivasi dari gerakan perlawanan rakyat Silungkang 1926–1927. Penelitian memperlihatkan bahwa perlawanan mempunyai motivasi untuk mengusir penjajah Belanda dari Sawahlunto, dan dari Indonesia seluruhnya. Karena semangat nasionalisme yang besarlah orang Silungkang mendirikan organisasi Sarekat Islam pada 1915, mengikuti Sarekat Islam di Jawa, yang kemudian berubah menjadi Sarekat Rakyat pada 1924. Semangat nasionalisme yang besar membuat mereka bersedia menerima *ilmu kuminih* dan menanti penetapan *D day* pemberontakan dari Komite Sentral PKI di Jawa daripada ikut dengan Sarekat Islam yang kooperatif terhadap Belanda.

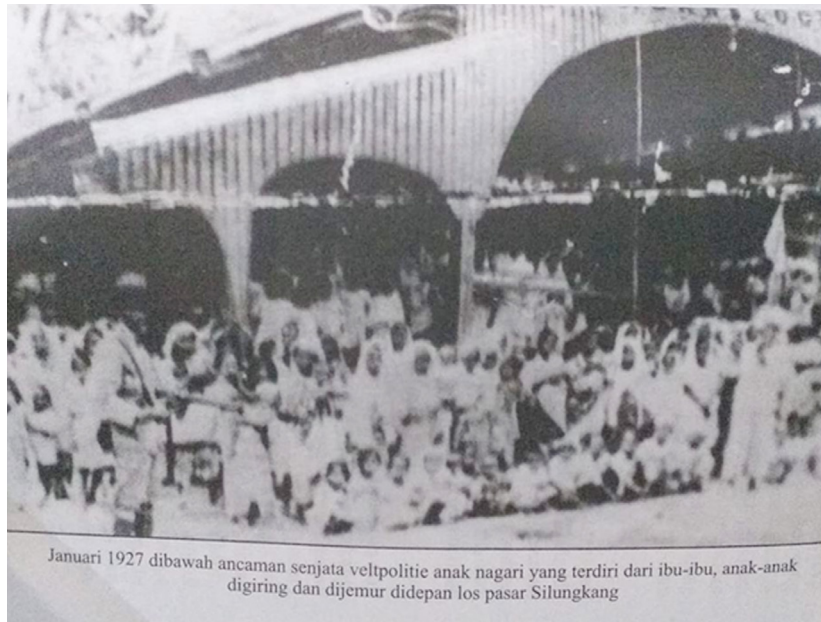
Semangat nasionalisme ini juga yang mendorong Sarekat Islam Silungkang bekerja sama dengan Perserikatan Kaum Buruh Tambang (PKBT) Sawahlunto di bawah pimpinan Kasan Wijoyo dan dua orang serdadu Belanda asal Manado, Sersan Mayor Pontoh dan Sersan Rumuat. Dengan adanya kenyataan tentang kerja sama antarorganisasi dan antarindividu yang agamanya berbeda, gerakan pemberontakan rakyat Silungkang ini dapat juga dikategorikan sebagai sebuah gerakan perlawanan kaum nasionalis Indonesia melawan penjajah Belanda.

DAFTAR PUSTAKA

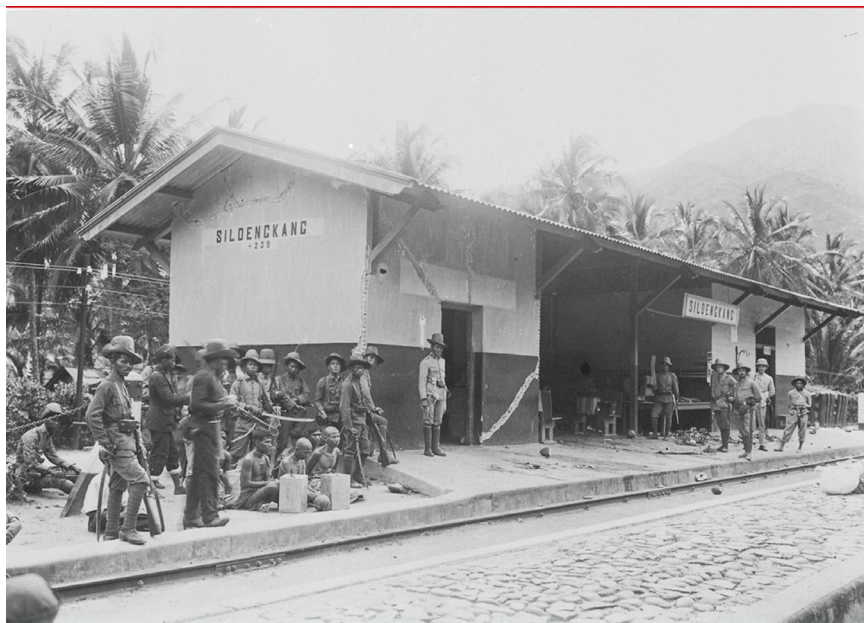
- Abdullah, Taufik. "Shades of Grey (A Political Memoir of Modern Indonesia, 1965-1998). Jusuf Wanandi: Singapore: Equinox, 2012: Ingatan Pribadi dan Sejarah." *Masyarakat Indonesia* 40, no. 1 [Juni 2014]: 127–130.
- Antlöv, Hans; dan Sven Cederöth. *Kepemimpinan Jawa; Perintah Halus, Pemerintahan Otoriter*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Badarudin, Firdaus. "Kecamatan Silungkang dalam Angka. Analisis dan Rekomendasi," naskah ketik tidak diterbitkan, 2011.
- Benda, Harry J. & Ruth Mc Vey. *The Communist Uprisings of 1926–1927 in Indonesia: Key Documents*. Part III. Translation Series. Modern Indonesia Project. Ithaca, New York: Cornell University, 1960.
- Blumberger, J. Th. Petrus. *De Communist Beweging in Nederlandsc-Indie*. Harleem: Tjenk Willink & Zoon, 1941.
- Crapanzano, Vincent. "Hermes' Dilemma: The Masking of Subversion in Ethnographic Description," dalam *Writing Culture, The Poetics and Politics of Ethnography*, eds. James Clifford & George E. Marcus, 51–76. Berkeley: University of California Press, 1986.
- C.v.O. Conferentie Siloengkang ke I. "Peringatan Conferentie Pertemoean Siloengkang ke I." Dokumen tercetak, tanpa penerbit, tanpa tahun terbit, 1940(?).
- Marzali, Amri. "Orang Silungkang di Jakarta. Latar Belakang dan Fungsi Konflik dalam Sistem Kekekabatan Mereka." Bagian Tugas Untuk Ujian Sarjana Antropologi, Fakultas Sastra dan Kebudayaan, Universitas Gajah Mada, 1973.
- Marzali, Amri dan Robert Siburian. *Pengembangan Industri Tenun Silungkang*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemasyarakatan dan Kebudayaan – LIPI, 1998.
- Nasution, Abdul Muluk. *Pemberontakan Rakyat Silungkang Sumatera Barat 1926–1927*. Jakarta: Mutiara, 1981.
- Raid, Hasan. *Untuk Kebenaran Keadilan dan Kemanusiaan*. Penerbit Cipta Lestari, 2002.
- Said, Nawir. *Perlawanan Rakyat Silungkang Terhadap Kolonial Belanda 1927 di Sumatera Barat*. Jakarta: Persatuan Keluarga Silungkang, 2005.

- Schrieke, B. "The Causes and Effects of Communism on the West Coast of Sumatra," dalam *Indonesian Sociological Studies*. The Hague, Bandung: W. van Hoeve Ltd., 1955.
- Sirin, Anwar. "Perang Rakyat Silungkang Sumatra Barat 1927: Sebuah Kenangan," naskah ketik, diperkirakan ditulis tahun 2002.
- Taher, Munir. "Sejarah Kain Tenun Silungkang," naskah ketika tidak diterbitkan, n.d.
- Zed, Mestika. *Pemberontakan Komunis Silungkang 1927; Studi Gerakan Sosial di Sumatera Barat*. Yogyakarta: Syarikat Indonesia, 2004.

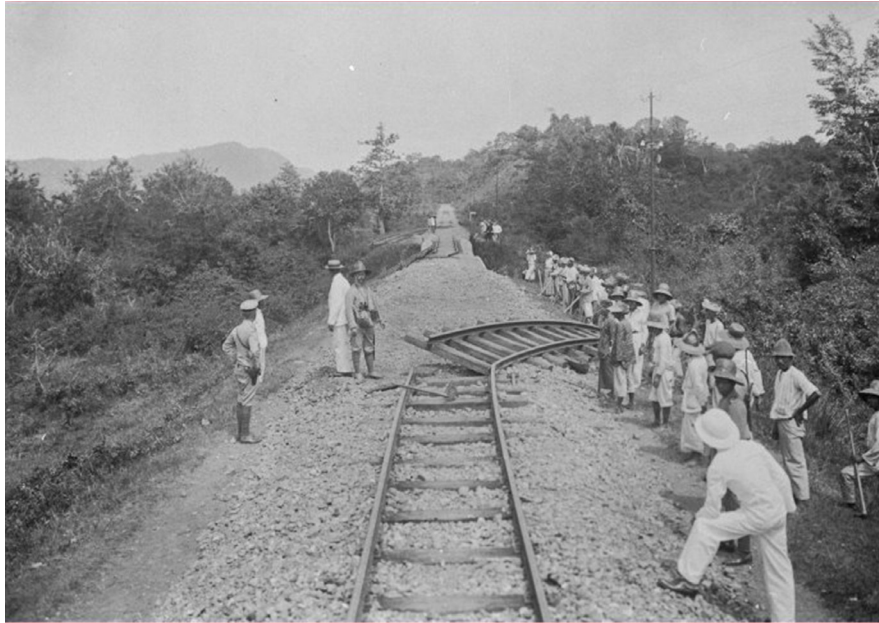
LAMPIRAN



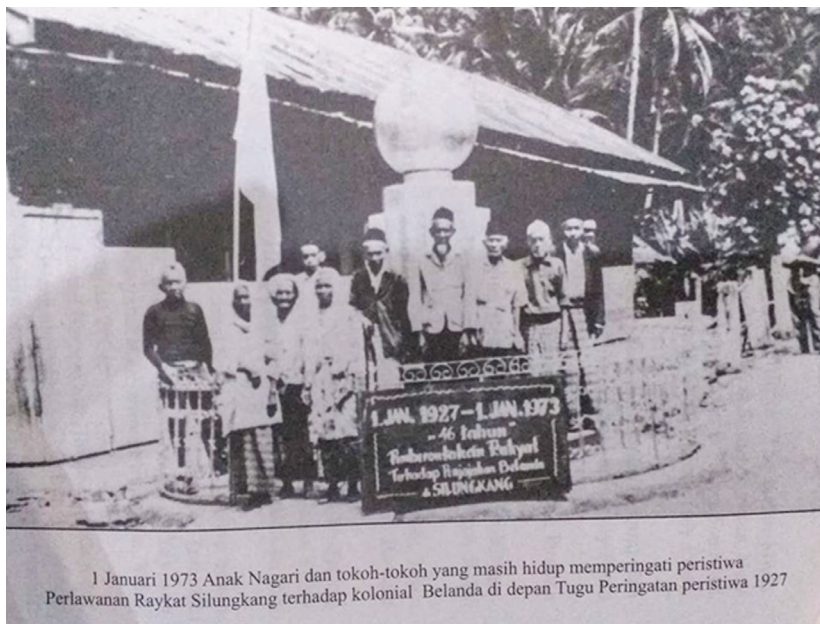
Gambar 1. Ibu-ibu dan anak-anak Silungkang dikumpulkan di Pasar Silungkang selepas kejadian Perlawanan Rakyat Silungkang 1 Januari 1927 (Foto koleksi Linimasa).



Gambar 2. Polisi Kolonial menangkap beberapa pejuang Perlawanan Rakyat Silungkang pada 1927 untuk dibawa ke Sawahlunto dengan kereta api (Foto Koleksi Linimasa).



Gambar 3. Jalan kereta api yang dirusak oleh Pejuang Perlawanan Rakyat Silungkang pada 1927.
(Foto Koleksi Linimasa).



1 Januari 1973 Anak Nagari dan tokoh-tokoh yang masih hidup memperingati peristiwa
Perlawanan Rakyat Silungkang terhadap kolonial Belanda di depan Tugu Peringatan peristiwa 1927

Gambar 4. Sisa pejuang Perlawanan Rakyat Silungkang 1927 yang masih hidup pada 1973.
(Foto Koleksi Linimasa).